

**EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG RI NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KDRT TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA RAHA KELAS II
SULAWESI TENGGARA**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan
pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

LAUHIN MAHFUDZ KAMIL

NIM: 10100113036

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2017

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : LAUHIN MAHFUDZ KAMIL

Nim : 10100113036

Tempat /Tgl. Lahir : Tual, 29 November 1995

Jurusan : Peradilan Agama

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul : Efektifitas UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan KDRT Terhadap Penyelesaian Perceraian di
Pengadilan Agama Raha Kelas II Sulawesi Tenggara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Efektifitas UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT Terhadap Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Raha Kelas II Sulawesi Tenggara” adalah benar hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan (tanpa campur tangan penyusun), maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Samata, 27 Juli 2017

Penyusun



LAUHIN MAHFUDZ KAMIL
NIM: 1010011303

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul, "Efektifitas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Raha Kelas II Sulawesi Tenggara", yang disusun oleh Lauhin Mahfudz Kamil, NIM: 10100113036, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan pada Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Aiauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2017 M, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulkaedah 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam ilmu Syari'ah dan Hukum, Jurusan Peradilan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 14 Agustus 2017 M
21 Zulkaidah 1438 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
Sekretaris : Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag.
Munaqisy I : Dr. H. Supardin, M.H.I.
Munaqisy II : Dra. Hj. Hartini Tahir, M.H.I.
Pembimbing I : Dr. H. Abd. Halim Talli, S. Ag. M. Ag.
Pembimbing II : Drs. H. Muh. Jamal Jamil, M.Ag.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Aiauddin Makassar,



Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
NIM: 10161990031003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini sebagaimana mestinya.

Kebesaran jiwa dan kasih sayang yang tak bertepi, doa yang tiada terputus dari kedua orang tuaku yang tercinta, Ayahanda Drs. Ramly Kamil dan Ibunda tercinta Rostina Syam, yang senantiasa memberikan penulis curahan kasih sayang, nasihat, perhatian, bimbingan serta doa restu yang selalu diberikan sampai saat ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Isnarni Jumaing tercinta dan saudariku Nur Hidayah Kamil tercinta beserta keluarga besar penulis, terima kasih atas perhatian dan kasih sayangnya selama ini dan serta berbagai pihak yang tulus dan ikhlas memberikan andil sejak awal hingga usainya penulis menempuh pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam menyusun skripsi ini tidak sedikit kekurangan dan kesulitan yang dialami oleh penulis, baik dalam kepustakaan, penelitian lapangan, maupun hal-hal lainnya. Tetapi berkat ketekunan, bimbingan, petunjuk serta bantuan dari pihak lain akhirnya dapatlah disusun dan diselesaikan skripsi ini menurut kemampuan penulis. Kendatipun isinya mungkin terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, baik mengenai materinya, bahasanya serta sistematikanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini disusun dan diselesaikan berkat petunjuk, bimbingan dan bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, sudah pada tempatnyalah penulis menghanturkan ucapan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah rela memberikan, baik berupa moril maupun berupa materil dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang terdalam dan tak terhingga terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si.** selaku Rektor UIN Alauddin Makassar;
2. Bapak **Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.** selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya;
3. Bapak **Dr. H. Supardin M.H.I.** selaku Ketua Jurusan Peradilan Agama UIN Alauddin Makassar beserta ibu **Dr. Hj. Patimah, M.Ag.** selaku Sekertaris Jurusan Peradilan Agama;
4. Bapak **Dr. H. Abd. Halim Talli, S.Ag.,M.Ag.** selaku pembimbing I dan Bapak **Drs. H. Muh. Jamal Jamil, M.Ag.** selaku pembimbing II. Kedua beliau, di tengah kesibukan dan aktifitasnya bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan petunjuk dan bimbingan dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak dan ibu dosen serta seluruh staf akademik dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar;
6. Instansi terkait dan responden yang telah bersedia membantu dan memberikan data kepada penulis dalam hal ini yakni dari pihak Pengadilan Agama Raha yang telah memberikan masukan dan saran selama penyusunan skripsi ini;
7. Kepada saudara-saudaraku **Ahmad Yuskirman Sah, Fauzan Ismail Ratuloly**, dan Seluruh teman kuliah Jurusan Peradilan Agama Angkatan 2013 Khususnya **M. Awwaluddin Ar-Rasyid, Amri, Muh. Faqih, Jumardin S.H, Jumardi S.H, Nurhadi, Riswan Setiawan, Sahrul, Ardianyah Basir, Hendra Nirwansyah, M. Mahdi, Mifta, Firman, Rijal, Chaeril Anwar, Hardiansyah Dewa, Alif, Wahyudi Sahri, Muh. Anhar** dan teman-teman yang tak dapat tersebut

namanya, terima kasih atas kesetiakawanan, dukungan dan motivasinya selama ini;

8. Seluruh Anggota Geng Bravo **Abi. Ruslan Saleh, S.HI, M.HI., Umi. Fatmawati, St. Nurjannah, Muh. Rijal, Nurul Inayah Hasyim, Laila Humaidah, S.H., Andi Srismiati, S.H., Khaerunnisa Syam, S.H., Fitri Utami syahrani, S.H.**, terima kasih atas dukungan dan motivasinya selama ini;
9. Seluruh anggota IKPA Makassar terima kasih atas dukungan dan motivasinya selama ini;
10. Seluruh Sahabat-Sahabati di UIN Alauddin Makassar terima kasih atas dukungan dan motivasinya selama ini;
11. Seluruh teman KKN UIN Alauddin Makassar Angkatan 54 khususnya posko 11 Desa Tanjonga **Hasriandi, Iche, Tc, Wahidin, Icha, Inha, Nina, Lista dan Husna**. Terima Kasih atas doa, dukungan dan motivasinya selama ini.
12. Seluruh masyarakat Desa Tanjonga Kab. Jeneponto Terima Kasih atas doa, dukungan dan motivasinya selama ini.
13. Kepada Teman-Teman Seperjuangan SMA Swasta Darussalam yang selalu memberi semangat kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
14. Kepada seluruh keluarga besarku yang tidak bosan memberikan bantuan, semangat kepada penulis sehingga dapat terselasaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan, kerjasama, uluran tangan yang telah diberikan dengan ikhlas hati kepada penulis selama menyelesaikan studi hingga rampungnya skripsi ini. Begitu banyak bantuan yang telah diberikan bagi penulis, namun melalui doa

dan harapan penulis, Semoga jasa-jasa beliau yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan pahala yang setimpal dengannya dari Allah swt.

Akhirnya dengan penuh rendah hati penulis mengharap tegur sapa manakala terdapat kekeliruan menuju kebenaran dengan mendahulukan ucapan terima kasih yang tak terhingga.

Makassar, 15 Juli 2017

Penulis

LAUHIN MAHFUDZ KAMIL



DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN TEORETIS	11
A. Tinjauan Umum Tentang KDRT	11
B. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT	14
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap KDRT	26
D. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	42
A. Lokasi dan Jenis Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Pengumpulan Data	43
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	47
BAB IV Penyelesaian Perceraian Berdasar Pada UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT di Pengadilan Agama Raha Sulawesi Tenggara	49
A. Penerapan UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT di Pengadilan Agama Raha Sulawesi Tenggara	49
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Dengan Alasan KDRT di Pengadilan Agama Raha Sulawesi Tenggara	53
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	,	apostof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... إ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	i	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

4. Tā' Marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ىّ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* menjadi (i).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : Lauhin Mahfudz Kamil

NIM : 10100113036

Judul : Efektifitas UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam Menyelesaikan Perceraian di Pengadilan Agama Raha kelas II Sulawesi Tenggara

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Efektifitas UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Raha Sulawesi Tenggara. Berdasar pada putusan hakim tahun 2016 tentang alasan perceraian karena KDRT. Perkawinan merupakan lembaga sosial yang terkecil yang menghasilkan konsekwensi hukum terkait dengan hak dan kewajiban suami istri dalam menempuh kehidupan dalam rumah tangga, agar saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin satu sama lainnya. Namun kadang-kadang tujuan tak sesuai cita-cita, walaupun telah diusahakan sedemikian rupa maka perceraian pun terjadi, perceraian merupakan akibat perkawinan yang kurang harmonis antara suami istri, yang di sebabkan salah satunya adalah KDRT. Berlatar belakang dari masalah tersebut, penulis tertarik untuk meneliti Bagaimana penerapan UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dalam penyelesaian perceraian dan Bagaimana pertimbangan Hakim. Dalam hal ini penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Raha.

Penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah. Pendekatan yuridis dan Pendekatan syar'i. Adapun sumber data penelitian ini adalah Pengadilan Agama Raha. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penulusuran referensi. Lalu, teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT yang diterapkan Pengadilan Agama Raha dengan Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam penyelesaian kasus-kasus perceraian akibat KDRT dengan berkesimpulan sudah tidak terjalin ikatan batin sehingga tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan pernikahan. Sedangkan pertimbangan kemaslahatan cenderung bersifat umum yakni bilamana suasana kehidupan rumah tangga sudah tidak kondusif sehingga jika tetap diteruskan dikhawatirkan akan mendatangkan kemudaratn daripada kemaslahatan maka lebih baik diceraikan.

Implikasi dalam penelitian ini adalah UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) termaksud wewenang Peradilan Agama, bergandengan dengan peraturan-peraturan lain, namun kewenangan mengadili dari Pengadilan Agama hanya terkait hal perdata yang tercantum didalam UU tersebut saja, sehingga kewenangan Pengadilan Agama untuk memberikan perlindungan hukum hanya memutuskan perceraian,

terlihat bahwa UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tidak berjalan efektif dari sisi pidana oleh karena bukan kewenangan Pengadilan Agama.



BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Perkawinan merupakan perbuatan yang penting dalam kehidupan manusia, karena merupakan bentuk pergaulan hidup manusia dalam lingkungan masyarakat sosial yang terkecil, tetapi juga lebih dari itu bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan perbuatan keagamaan. Pada hakekatnya hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syari'at Islam, yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak islam. Di atas dasar inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan di kalangan orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak, sebab perkawinan semacam inilah yang biasa diharapkan memiliki nilai *transcendental* dan *sacral* untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan syari'at islam.¹

Negara mempunyai kepentingan pula untuk turut mencampuri urusan masalah perkawinan dengan membentuk dan melaksanakan perundang-undangan tentang Perkawinan. Tujuannya untuk memberi perlindungan terhadap rakyat sebagai salah satu unsur negara, melalui hukum yang berlaku dan diberlakukan terhadap mereka. Untuk pengaturan masalah perkawinan tersebut telah terbentuk UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara dan masyarakat di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang khusus

¹Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Cet I Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) h. 96.

untuk orang Islam. Sebagaimana tujuan perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 1 UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kehendak untuk melakukan perkawinan pada umumnya dimulai dengan timbulnya rasa saling mencintai diantara calon suami istri, kemudian berlanjut dengan kehendak untuk mengikat rasa saling mencintai itu dalam bentuk perkawinan. Dengan perkawinan itulah muncul kontrak kuat (*misakon golizoh*) secara timbal balik berupa hak dan kewajiban antara suami istri.

Selain bersifat ilahiah, perkawinan merupakan lembaga sosial yang menghasilkan konsekwensi hukum, terkait dengan hak dan kewajiban suami istri². Melalui pernikahan seorang laki-laki dan seorang perempuan bertekad untuk menempuh bahtera rumah tangga apapun rintangan yang menghadapi. Bahkan Pasal 33 UU RI No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 (2) KHI menegaskan agar suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu pada yang lain.

Dalam struktur keluarga kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga membawa konsekwensi yang tidak ringan, yaitu seorang suami karena memiliki kekuatan fisik maka ia berkewajiban memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Setelah suami memenuhi kewajibannya maka menjadi kewajiban istri untuk taat dan menjaga harkat dan martabat suami (keluarga). Sebuah keseimbangan dalam hal kewajiban menurut QS. Al-Nisa' 3/4: 34 menyatakan:

²Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 248.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِتَتْنَ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
 اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Terjemahnya:

Laki-laki menjadi pemimpin bagi wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lainnya (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suami tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya maka nasihatilah mereka dan pisahkan lah mereka dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jaanuntuk menyusahkan-nya. Sesungguhnya Allah mahatinggi lagi Mahabesar". (Q.S. Al-Nisaa'/4:34)

Pada mulanya setiap pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pasti memiliki tujuan yang sama. Tetapi, tidak selalu tujuan perkawinan itu dapat dilaksanakan sesuai cita-cita, walaupun telah diusahakan sedemikian rupa oleh pasangan suami istri, jika ada masalah yang mengganggu kerukunan pasangan ini sampai menimbulkan permusuhan maka perceraian pun terjadi. Perceraian merupakan akibat perkawinan dari kurang harmonisnya pasangan suami istri yang disebabkan banyak faktor antara lain kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana yg dituangkan dalam Kompilasi Hukum

Islam (KHI) pasal 116 huruf d “Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain”³.

Pemerintah telah bersaha agar kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri segera diakhiri dengan lahirnya UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT yang disahkan pada tanggal 22 September 2004. Masalah KDRT tidak terlepas dari diskriminasi oleh pelaku terkhusus suami dan yang menjadi korban adalah para istri, sehingga upaya penghapusan kekerasan harus terkait dengan upaya mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan.

Ketika perempuan telah menikah, maka terkontruksi anggapan bahwa mereka hanya menjadi milik laki-laki (suami). Implikasinya adalah pembagian peran kerja pada umumnya lebih menekankan pada sisi gender. Kekuatan fisik dan kemampuan laki-laki menjadi standar pemimpin dalam keluarga. Anggapan seperti ini sudah sangat membudaya dalam masyarakat, sehingga laki-laki (suami) diposisikan sebagai kepala rumah tangga sedangkan perempuan (istri) diposisikan sebagai ibu rumah tangga dengan tugas-tugas domestic yang sangat melelahkan.

Upaya untuk mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan telah dilakukan dalam tata hukum Indonesia, diantaranya tentang kedudukan suami istri yang diatur dalam pasal 31 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: 1. Hak kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, 2.

³Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet. 1; Jakarta: Gema Press, 2010), h. 20.

Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, dan 3. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Hal ini merupakan salah satu perkara yang membutuhkan perhatian karena kejadian seperti ini hampir terjadi diseluruh wilayah tanah air RI dan salah satunya adalah daerah kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara yang mencapai 70% kekerasan dalam rumah tangga, ini dijadikan sebagai alasan perceraian. Dengan demikian jika perkara ini dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 yang memperbolehkan bercerai dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga tersebut maka hal ini dianggap benar. Namun dalam penyelesaian perkara perceraian dengan alasan KDRT di kabulkan di Pengadilan Agama, maka bisa dikatakan sebagian besar keluarga yang berada di Kab. Muna mengalami keretakan rumah tangga, sehingga perlu adanya pertimbangan lain yang diharapkan dapat mengatasi masalah itu. Salah satunya adalah dengan menerapkan UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dalam menyelesaikan perkara perceraian yang intinya tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan tanpa mengabaikan hak korban kekerasan rumah tangga tersebut.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga dengan mempertimbangkan UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

B. Definisi Operasional

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang akan dilakukan. Fokus penelitian ini diungkapkan secara eksplisit untuk mempermudah peneliti sebelum melaksanakan observasi. Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Raha kabupaten Muna melalui wawancara langsung kepada ketua Pengadilan Agama dan para hakim serta mengambil data-data lainnya yang dianggap perlu.

2. Deskripsi Fokus

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefinisikan dan memahami penelitian ini maka penulis akan memaparkan pengertian beberapa istilah yang dianggap penting:

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT adalah aturan yang dibentuk oleh pemerintah RI untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi

korban kekerasan dalam rumah tangga, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga

3. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
4. Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.
5. Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam memutus dan mengadili perkara bagi pencari keadilan yang beragama islam dalam hal perdata.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan pokok masalahnya adalah Bagaimana Efektifitas UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Raha Kelas II Sulawesi Tenggara.

Dan submasalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT terhadap penyelesaian perkara perceraian dengan alasan KDRT?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan KDRT?

D. Kajian Pustaka

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, yang diperoleh dari beberapa hasil penelitian maupun buku-buku yang berkaitan dengan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) diantaranya:

Soeroso Moerti Hadiati dalam bukunya Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Prespektif Yuridis-Viktimologis menjelaskan fenomena tindak kekerasan dalam masyarakat terhadap perempuan, upaya penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan KUHP dan UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

SinlaEloE Libby, Soekiman TH, SinlaEloE Paul dalam bukunya Jalan Panjang Menuju Keharmonisan Rumah Tangga menjelaskan peningkatan martabat perempuan dan memberikan ruang terhadap upaya menyentuh pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam lingkup pembahsan tentang keharmonisan dan masa depan perempuan Nusa Tenggara Tmur (NTT).

Hazlan salah satu alumni UIN Alauddin Makasar dalam skripsinya dengan judul Respon Istri tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Makassar (Studi Kasus di LBH Apik Makassar Tahun 2011-2015) menjelaskan bagaimana Istri Menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Aspek Hukum. Pada skripsinya menjurus pada bagaimana istri menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam aspek hukum, didalam skripsinya tidak dijelaskan tentang efektifitas UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT

terhadap penyelesaian perkara perceraian dengan alasan KDRT di Pengadilan Agama.

Begitu pula dengan peraturan Perundang-Undangan RI yang berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU RI No. 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konversi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dan UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dan dari pada itu penulis melihat belum adanya penelitian tentang efektifitas UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT di suatu daerah yang tingkat perceraian dengan alasan KDRT tinggi, maka penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian bertujuan:

- a. Mengetahui penerapan UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dalam penyelesaian perkara perceraian dengan alasan KDRT
- b. Mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan KDRT

2. Kegunaan

1. Kegunaan secara teoretis

Secara teoretis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu hukum yang memiliki kaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga mengungkap permasalahan dan menemukan solusinya.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis diharapkan tulisan ini dapat menjadi referensi pemikiran kepada:

- a. Aparat penegak hukum, menjalankan fungsinya sebagai instansi yang mengemban tugas dalam lingkup rumah tangga, agar dapat menegakkan hukum dan keadilan bagi para pelaku maupun korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
- b. Hakim, agar dapat menjadi pertimbangan didalam ruang lingkup daerah yang memiliki penduduk mayoritas melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
- c. Warga Indonesia pada umumnya yang memiliki corak kehidupan kultur yang berbeda-beda, sehingga dapat menjadi rujukan.

Disamping itu juga, melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1. Pengertian Tindak Kekerasan

Kekerasan dalam bahasa Inggris *violence* berasal dari bahasa Latin *violentus* yang berasal dari kata *vī* atau *vīs* berarti kekuasaan atau berkuasa adalah dalam prinsip dasar dalam hukum publik dan privat Romawi yang merupakan sebuah ekspresi, baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang umumnya berkaitan dengan kewenangannya. Menurut Martha⁴ “berusaha, atau menggunakan kekerasan fisik kepada satunorang atau lebih, yang mengakibatkan kerusakan fisik atau non fisik pada satu orang”.

Kekerasan terkait pada bentuk pidana tertentu seperti pembunuhan, penganiyaan, perkosaan dan pencurian. Pengertian kekerasan menurut Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi ; membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

Dipasal tersebut kata “tidak berdaya” bermakna tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tak dapat memberikan perlawanan sama sekali. Beberapa pasal lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering kali kekerasan dikaitkan dengan ancaman. Pengkaitan ini yg memberikan

⁴Mharta, Aroma Emina, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, (Jakarta: UII Press 2003), h.21.

pengertian bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan non fisik (ancaman kekerasan)

Pasal 2 Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dijelaskan bahwa: Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, seksual atau psikologis, ancaman tindak tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Adapun kekerasan terhadap anak adalah Setiap perbuatan yang ditunjukkan pada anak yang berakhir kesengsaraan dan penderitaan baik fisik maupun psikis, yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.

2. Pengertian Rumah Tangga

Rumah tangga adalah organisasi kecil masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan atau disebut juga sebagai keluarga. Rumah tangga terdiri dari satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama di sebuah tempat tinggal dan juga berbagi makanan atau akomodasi hidup, dan bisa terdiri dari satu keluarga atau sekelompok orang. Sebuah tempat tinggal dikatakan berisi beberapa rumah tangga jika penghuninya tidak berbagi makanan atau ruangan. Rumah

tangga adalah dasar bagi unit analisis dalam banyak model sosial, mikroekonomi, dan pemerintahan⁵.

Ruang lingkup rumah tangga meliputi

- a. Suami istri dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dan menetap di rumah tangga tersebut.
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.⁶

3. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 jelas tertera di pasal 1 ayat 1 bahwa :

“Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Menurut Sukri (2004, h.7) Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain,

⁵Sinlalo, Libby, Soekriman, Tri dan Sionlalo, Paul. *Jalan Panjang Menuju Keharmonisan Rumah Tangga* (Nusa Tenggara Timur; Rumah Perempuan Kupang, 2011). h. 13.

⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT* (Cet. I; Jakarta; Gama Press, 2010)

yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan atau psikologis, ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang atau penekanan secara ekonomis yang terjadi dalam lingkup rumah tangga⁷. Kekerasan terhadap perempuan atau istri dapat diartikan sebagai suatu tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi didalam keluarga, dan melanggar hak asasi perempuan.

B. Tinjauan Umum tentang Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Isu tentang KDRT mulai merebak di Indonesia seiring dengan diratifikasinya *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.⁸ CEDAW, mengintrodusir adanya 5 (lima) bentuk ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender terhadap perempuan, yakni:

1. Adanya *stereotype*, pelabelan bahwa perempuan sebagai warga kelas dua;
2. Marjinalisasi, peminggiran terhadap perempuan dalam pengambilan keputusan;
3. Subordinasi, perempuan ditempatkan pada peran yang tidak penting;
4. *Doble burden*, adanya beban ganda pada perempuan dalam peran publik sekaligus peran domestik; dan

⁷Sukri, *Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri*. (Yogyakarta; Gema Media, 2004), h. 21.

⁸Paul Sionlaeloe, *Jalan Panjang Menuju Keharmonisan Rumah Tangga* (Kupang: Rumah Perempuan Kupang, 2011), h. 6.

5. Adanya kekerasan dalam rumah tangga.

Sebagai sebuah konvensi, CEDAW hanya mempunyai daya ikat secara moral dan tidak mempunyai daya paksa secara normatif. Oleh karena itu, kemudian dikeluarkanlah UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Melalui UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, kelima bentuk ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dapat diberi kekuatan hukum yang mengikat sekaligus mempunyai daya paksa secara normatif. UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, menempatkan perempuan sebagai kelompok rentan yang paling banyak mengalami KDRT. Untuk itu, UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT hadir dalam kerangka memberikan perlindungan secara khusus bagi kaum perempuan. Dalam konteks ini, bukan berarti kelompok laki-laki dan anak-anak tidak mendapat perhatian secara serius. UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT tetap menempatkan kedua kelompok dimaksud juga sebagai pihak yang mungkin saja menjadi korban KDRT, namun dari fenomena yang ada kelompok perempuan yang paling banyak menderita sebagai korban KDRT.

Dicantumkannya ketentuan Pasal 1 Angka 2 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT merupakan wujud tanggung jawab negara dalam melaksanakan amanat Alinea IV Pembukaan UUD 1945. Secara sederhana, Alinea IV Pembukaan UUD 1945 memberikan 4 (empat) kata kunci yang harus menjadi fungsi negara, yakni:

1. Melindungi,

2. Mensejahterahkan,
3. Mencerdaskan, dan
4. Mendamaikan Kehidupan Rakyat.

Keempat kata kunci ini lebih dikenal sebagai amanat penderitaan rakyat (Ampera). Dalam konteks sub kalimat, “...*jaminan negara*...,” maka yang dimaksud di sini adalah jaminan dari Pemerintah sebagai penerima mandat Ampera, dan juga dari rakyat sebagai pemberi mandat Ampera, atau dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT disebut sebagai partisipan. Dengan kata lain, UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT menghendaki adanya jaminan baik dari Pemerintah maupun rakyat agar:

1. KDRT dicegah,
2. Pelaku KDRT ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku, dan
3. Korban KDRT terlindungi.

Berangkat dari pemikiran tentang KDRT sebagai salah satu kejahatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, maka Pasal 3 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT menggariskan bahwa penghapusan KDRT dilaksanakan berasaskan:

1. Penghormatan HAM,
2. Keadilan dan Kesetaraan Gender,
3. Non Diskriminasi, dan
4. Perlindungan Korban.

Hadirnya UU PKDRT, tidak saja melihat rumah tangga sebagai relasi suami-isteri semata, namun memperluas relasi tersebut. UU PKDRT pertama-tama memberikan batasan lingkup rumah tangga pada konsep keluarga inti atau keluarga batih (*nuclear family*). Artinya, sebuah rumah tangga terbentuk dari suami, isteri, dan anak. Untuk konteks keluarga inti, pendekatan domisili tidak berlaku. Kalaupun mereka tidak menetap dalam satu rumah, namun masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka konsep rumah tangga mencakup mereka. Selanjut UU PKDRT memperluas lingkup rumah tangga menjadi keluarga luas (*extended family*). Artinya, sebuah rumah tangga tidak saja meliputi keluarga inti saja, tapi juga meliputi orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan keluarga batih karena:

1. Hubungan Darah,
2. Perkawinan,
3. Persusuan,
4. Pengasuhan, dan
5. Perwalian.

Untuk kelima kategori ini, pendekatan domisili digunakan. Mereka baru bisa tercakup dalam konsep rumah tangga, kalau menetap dalam satu rumah. UU PKDRT, dengan menggunakan pendekatan domisili, kemudian memasukan pembatu rumah tangga ke dalam lingkup rumah tangga. Syaratnya adalah:

1. Pembatu rumah tangga tersebut tinggal menetap dalam rumah, dan
2. Sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga.

Dalam konteks kekerasan, beberapa pasal mendefinisikan kekerasan sebagai berikut: Pasal 6 UU PKDRT, memberi penjelasan bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Berkaitan dengan ketentuan ini, terlihat perbedaan mendasar dengan yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). UU PKDRT menyatukan 17 (tujuh belas) Pasal dalam KUHP ke dalam Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT, dan 7 (tujuh) Pasal dalam KUHP ke dalam Pasal 44 ayat (1), dan ayat (2) UU PKDRT.

Pasal 7 UU PKDRT menjelaskan bahwa kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8 UU PKDRT menjelaskan bahwa kekerasan seksual meliputi:

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, dan
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9 UU PKDRT memberi kriteria penelantaran rumah tangga, yaitu:

1. Menelantarkan orang yang menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan, dan

2. Mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah.

Indonesia semenjak berdiri, telah secara serius menetapkan HAM sebagai bagian dari kontrak sosial secara konstitusional. Paling tidak Alinea I Pembukaan UUD 1945, diawali dengan kalimat deklaratif, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, ...” Artinya, Negara Indonesia didirikan atas kesadaran akan pentingnya HAM. Bahkan pada Amandemen II UUD 1945, ditambahkan satu bab dengan sepuluh pasal yang berisi sepuluh kelompok hak dasar yang merupakan perumpunan yang dikenal dalam HAM. Perspektif Ham yang dikembangkan di Indonesia, secara operasional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). UU HAM mengelompokkan perangkat hak dimaksud atas 10 (sepuluh) hak dasar, yakni:

1. Hak untuk hidup,
2. Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan,
3. Hak mengembangkan diri,
4. Hak memperoleh keadilan,
5. Hak atas kebebasan pribadi,
6. Hak atas rasa aman,
7. Hak atas kesejahteraan,
8. Hak turut serta dalam pemerintahan,
9. Hak wanita, dan
10. Hak anak.

Kesepuluh kelompok hak dasar tersebut, melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya. Artinya, tidak diberikan, diwariskan, atau tidak dapat dicabut oleh siapapun. Dalam konteks ini, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, merupakan hak yang melekat pada setiap manusia dan merupakan karunia dari Sang Pencipta. Oleh karena itu, HAM wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Dengan menyebut urutan negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, menunjukkan bahwa UU HAM menempatkannya sesuai dengan siklus tanggung jawab dalam kehidupan bernegara. Tanggung jawab utama dan pertama ada pada negara. Bentuk tanggung jawab tersebut diwujudkan dalam pengaturan hukum. Kemudian hukum dijalankan oleh pemerintah dan setiap orang. Pemerintah sebagai aktor yang mengoperasikan kebijakan negara dalam bentuk pengaturan hukum, telah banyak melakukan upaya ke arah pengakuan, penghormatan, pemenuhan, penyebarluasan, dan penegakan (P5) HAM.

Dalam konteks penghapusan KDRT, ada sejumlah kebijakan yang telah dilakukan, yakni:

1. Meratifikasi berbagai instrumen HAM Internasional, seperti: Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Rekomendasi Umum Nomor 19 tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Sidang Ke-11 Tahun 1992 Komite PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap

Perempuan; Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan tanggal 20 Desember 1993.

2. Mengeluarkan sejumlah instrumen HAM nasional, seperti: UU HAM; UU PKDRT; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Berkaitan dengan KDRT sebagai tindak pidana, diatur dalam Pasal 44-53 UU PKDRT. Ketentuan pidana dalam UU PKDRT memperlihatkan sejumlah aspek yang, yakni:

- a. Dari segi cara penjatuhan pidana (*strafmodus*)

Menggunakan stelsel alternatif penjara atau denda. Dengan adanya stelsel alternatif penjara atau denda sebagai pidana pokok, maka penuntut umum wajib menuntut secara alternatif, demikian juga hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku wajib menjatuhkannya secara alternatif pula. Penuntut umum tidak boleh hanya menuntut dengan pidana tunggal, hakim juga tidak boleh menjatuhkan pidana tunggal. Kalau dalam kenyataannya penerapan hanya menggunakan pidana tunggal, maka jelas penegak hukum telah salah menerapkan hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan cara yang melanggar hukum. Dengan adanya stelsel pidana alternatif ini, sejalan dengan tujuan utama dari UU PKDRT, yakni tetap menjaga keharmonisan rumah tangga. Selain itu, dalam bilangan teori hukum pidana, nampaknya pembentuk UU PKDRT menganut aliran *abolitionism*. Aliran yang menempatkan pidana penjara

sebagai *ultimum remidium* atau penghukuman paling akhir yang digunakan. Paling tidak selama lembaga pemasyarakatan belum mampu memainkan fungsinya sebagai pelembagaan nilai-nilai kemanusiaan (HAM), maka tidak ada dasar pembenaran pelaku tindak pidana dipidana dengan pidana penjara. Oleh karena sebagaimana adagium umum dalam pemikiran pemidanaan, yakni negara tidak berhak untuk membuat seseorang lebih buruk kondisinya, jika dibandingkan dengan sebelum menjalani pidana penjara.

b. Dari segi bobot ancaman pidana (*strafmaat*)

Menggunakan stelsel ancaman minimum umum dan ancaman maksimum khusus. Dalam bilangan hukum pidana, ancaman pidana minimum umum untuk pidana penjara adalah 1 (satu) hari, dan ancaman minimum umum untuk pidana denda adalah Rp.1,- (satu rupiah). Dalam artian, ketika pasal pidana yang ada hanya menyebut ancaman minimum saja, maka harus dibaca bahwa ancaman minimumnya dalam bobot seperti ini. Untuk itu, ketika penjatuhan pidananya dilakukan antara ancaman minimum umum dan ancaman maksimum umum, maka harus dilakukan secara paralel antara pidana penjara atau pidana denda. Untuk ancaman pidana maksimum, masing-masing pasal dalam UU PKDRT mengaturnya secara khusus. Artinya, selain yang sudah ditetapkan, penegak hukum tidak boleh menerapkan yang lain. Penegak hukum hanya diberi ruang untuk menerapkan pidana dari ancaman minimum umum hingga ancaman maksimum khusus pada pasal-per pasal.

c. Dari segi jenis pidana (*strafsoort*)

Menggunakan stelsel pidana pokok dan pidana tambahan. UU PKDRT juga memberikan ruang bagi penegak hukum untuk menerapkan pidana tambahan. Pasal 50 UU PKDRT, memberi kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa:

1. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu dari perlau, dan
2. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Nampaknya pembentuk UU PKDRT melihat bahwa hanya dengan pidana pokok, permasalahan KDRT tidak dapat tertanggulangi. Untuk pidana tambahan pembatasan ruang gerak pelaku, menjadi sangat penting ketika pelaku menjalani pidana alternatifnya dengan pidana denda. Artinya, ketika dijatuhkan pidana alternatif penjara atau denda, kemudian terpidana (palaku) memilih untuk menjalani pidana denda. Pembatasan ruang gerak pelaku dalam jarak dan waktu tertentu menjadi aspek yang sangat penting untuk melindungi korban. Selama proses pembatasan ruang gerak pelaku, semestinya upaya mediasi atau rekonsiliasi dapat dilakukan. Dapat juga pada masa ini, pelaku ditetapkan untuk menjalani pidana tambahan berupa mengikuti konseling. Dengan begitu akar permasalahan KDRT berupa komunikasi relasi suami-isteri (terutama) dapat ditanggulangi. KDRT sebagai salah satu bentuk pelanggaran terhadap HAM harus terus diupayakan untuk dihapus.

Kontruksi penghapusan KDRT dilaksanakan dengan P5 HAM. Yaitu:

- a. Aspek pengakuan
- b. Aspek penghormatan
- c. Pemenuhan,
- d. Penyebarluasan,
- e. Penegakan HAM

Untuk aspek pengakuan, secara eksplisit telah diatur dalam konstitusi dan berbagai instrumen operasional. Aspek yang bermasalah atau yang masih harus dicermati adalah aspek penghormatan, pemenuhan, penyebarluasan, dan penegakan HAM. Keempat aspek ini berkaitan dengan implementasi dari HAM dalam rumah tangga. Khusus berkaitan dengan penegakan HAM dalam rumah tangga, maka berkaitan langsung dengan UU PKDRT.

Untuk operasionalnya penegakan HAM yang diatur dalam UU PKDRT, secara teknis membutuhkan dukungan dari 3 (tiga) komponen, yakni:

- a. Komponen instrumen pelaksanaan,
- b. Komponen kelembagaan, dan
- c. Komponen sosial.

Untuk komponen instrument pelaksanaan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PP No. 4/2006). PP No.4/2006, menjabarkan secara teknis sinergisitas lintas sektor ketika menangani korban KDRT. Dalam PP No.4/2006, juga mengatur tentang komponen kedua, yakni dukungan kelembagaan dalam penegakan UU PKDRT.

Dalam perspektif HAM, satu terobosan yang dilakukan oleh UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT (PKDRT), yakni melalui ketentuan Pasal 55 UU tersebut yang berbunyi: *“Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan sorang saksi korban saja sudah cukup untuk meembuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya”*. Berkaitan dengan alat bukti yang sah, Pasal 184 KUHP, yakni:

- a. Keterangan saksi,
- b. Keterangan ahli,
- c. Surat,
- d. Petunjuk, dan
- e. Keterangan terdakwa.

Dalam hal ini, untuk kasus KDRT, salah satu alat bukti yang sah adalah keterangan saksi korban, yang digolongkan sebagai alat bukti yang sah pertama. Alat bukti yang lain dapat digunakan untuk mendukung alat bukti pertama tersebut. Namun untuk teknis perkara, sebaiknya alat bukti pertama didukung oleh alat bukti keterangan ahli atau alat bukti surat. Dengan begitu, kekuatan pembuktian dapat dikatakan sempurna untuk menyatakan secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah dalam proses pengadilan.

Yang menurut hemat penulis dalam UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT terkandung unsur aturan yang tidak dapat diterapkan oleh pengadilan agama oleh karena bersifat pidana sehingga perlindungan hukum yang

di berikan oleh pengadilan agama terbatas yaitu hanya dapat memutus hubungan pernikahan secara baik-baik.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Hukum Islam disyari'atkan bukan dengan hampa muatan, melainkan penuh dengan hikmah-hikmah disyari'atkannya suatu hukum. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari *nusyuz* dan gejala-gejala yang mengarah kepadanya.⁹ *Nusyuz* diantara suami istri dan masalah *tarikushsholah* anak yang berumur 10 tahun setelah diajari sholat oleh walinya sejak ia berumur tujuh tahun. Adapun tindakan keras dari suami terhadap pembantu misalnya karena tindakan sembrono dari pembantu tersebut belum didapatkan referensi untuk dianalisa secara hukum Islam selama ia bukan merupakan pelanggaran kriminal yang dalam penanganannya dipasrahkan kepada pihak berwenang.

Berkaitan dengan *nusyuz*, QS. Al-Nisa' 3/4: 34 menyatakan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ^ج فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ^ج وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ^ج فَعِظُوهُنَّ^ج وَأَهْجُرُوهُنَّ^ج فِي

⁹Syekh ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu*, Jilid II (Kairo, Jami'ah al-azhar,) h. 43.

الْمُضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ^ط فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا^ط إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Terjemahnya:

“Laki-laki (suami) itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”¹⁰

Ayat al-Qur'an yang sering dianggap tidak membela kaum perempuan ayat ke-34 surat an-Nisa', yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin dari perempuan, dan melegalkan pemukulan suami ketika istri berbuat *nusyuz*. Ayat ini sering dijadikan alasan yang mendukung budaya patriarkhi, yaitu bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan baik dalam masyarakat secara umum maupun dalam rumah tangga.

Asbabunnuzul ayat ini diturunkan berkenaan dengan kasus yang dialami oleh Sa'id bin Rabi' yang telah menampar istrinya, Habibah binti Zaid bin Abi Hurairah, karena telah melakukan *nusyûz* (pembangkangan). Habibah sendiri kemudian datang kepada Rasul saw. dan mengadukan peristiwa tersebut yang oleh Rasul. Rasul kemudian memutuskan untuk menjatuhkan *qishash* kepada Sa'id. Akan tetapi, Malaikat Jibril kemudian datang dan menyampaikan wahyu surat an-

¹⁰Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya, 2004). h. 108.

Nisa' ayat 34 ini. Rasulullah saw. pun lalu bersabda (yang artinya), “Aku menghendaki satu perkara, sementara Allah menghendaki perkara yang lain. Yang dikehendaki Allah adalah lebih baik.” Setelah itu, dicabutlah qishash tersebut.¹¹

Dalam tafsir *al-Mizan*, dinyatakan bahwa kata *rijal* dan *nisa'* dalam ayat tersebut tidak bersifat umum yaitu laki-laki dan perempuan. Akan tetapi laki-laki dan perempuan dalam hubungannya dalam rumah tangga, yaitu suami istri. Karena dalam ayat tersebut juga dipaparkan tentang perempuan-perempuan yang sholehah yang menjaga diri ketika suaminya tidak ada... dan seterusnya, serta tindakan laki-laki ketika perempuan berbuat *nusyuz*, maka laki-laki dan perempuan dalam konteks ini adalah suami dan istri dalam rumah tangganya.¹²

Senada dengan pendapat di atas, Asghar Ali Engineer juga menyatakan bahwa konteks ayat tersebut dibatasi hanya dalam rumah tangga. Menurutnya, secara normatif, memang al-Qur'an menempatkan laki-laki dalam kedudukan yang lebih superior terhadap perempuan. Namun, al-Qur'an tidak menganggap atau menyatakan bahwa struktur sosial bersifat normatif. Sebuah struktur sosial tidak pasti dan memang selalu berubah, dan jika pada sebuah struktur sosial dimana perempuan yang menghidupi keluarganya, atau menjadi teman kerja laki-laki, maka perempuan pasti sejajar atau bahkan superior terhadap laki-laki dan

¹¹Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munîr*, juz V, (Lebanon: Darul Fikr), h. 53-54.

¹²Sayyid Muhammad Husain at-Tabatha'I, *Al-Mizan fi al-Tafsir*, (Lebanon: al-'Alami, t.t.), h. 343-346.

memainkan peranan yang dominan di dalam keluarganya sebagaimana yang diperankan laki-laki.¹³

Firman Allah swt. surat al-Nisa' ayat 35 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

*“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam [juru pendamai] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.*¹⁴

Asbabunnuzul yaitu Pada suatu waktu datanglah seorang wanita menghadap Rasulullah SAW untuk mengadukan masalah, yaitu dia ditampar mukanya oleh sang suami. Rasulullah SAW bersabda: “Suamimu itu harus diqishash (dibalas)”. Sehubungan dengan sabda Rasulullah SAW itu Allah SWT menurunkan ayat ke-34 dan 35 yang dengan tegas memberikan ketentuan, bahwa bagi seorang laki-laki ada hak untuk mendidik istrinya yang melakukan penyelewengan terhadap haknya selaku istri. Setelah mendengar keterangan ayat

¹³Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoro, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), h. 237.

¹⁴Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya, 2004. h.109.

ini wanita itu pulang dengan tidak menuntut qishash terhadap suaminya yang telah menampar mukanya. (HR. Ibnu Abi Hatim dari Hasan)¹⁵

Berkaitan dengan pemukulan terhadap isteri, terdapat hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab *Shahihnya* diantara khutbah Beliau pada haji *wada'*, sebagai berikut :

حدثنا ابو بكر الى قول رسول الله ﷺ : فاتقوا الله في النساء ، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم احدا تكرهونه ، فإن فعن فاضربوهن ضربا غير مبرح ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف . رواه مسلم.

Artinya:

*Menceritakan kepada kami Abu Bakar.....dst. sampai sabda Rasulullah saw. : “Takutlah kalian kepada Allah terhadap perempuan karena kamu sekalian telah mengambil mereka sebagai amanah Allah dan dihalalkan bagimu kehormatannya (menggaullinya) dengan kalimah Allah, dan bagimu agar istri-istrimu tidak melakukan jimak dengan laki-laki lain yang tidak mau sukai di ranjangmu, maka pukullah istri-istrimu itu dengan pukulan yang tidak menyebabkan luka, dan istri-istrimu berhak atas rizki dan pakaian yang baik”.*¹⁶

Berdasarkan hadits di atas, dapat dimengerti bahwa pemukulan diperbolehkan karena istri berbuat zina yang keji. Dalam tafsir *al-Mizan* juga dijelaskan, berkaitan dengan penjelasan ayat 19 surat al-Nisa' tentang larangan untuk menguasai yaitu menahan, mempersempit gerak langkah dan mengekang. Larangan tersebut diberi pengecualian yaitu jika mereka berbuat *fahisyah*

¹⁵A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul Studi Pendalaman al-Qur'an* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 223.

¹⁶Sayyid Mohammad Husain, (*Al-Mizan, t.th.*), h. 254-255.

mubayyanah. Kata *fahisyah* dalam al-Qur'an biasanya digunakan untuk menyebut perbuatan zina, sementara *mubayyanah* dari kata *bayyana* cenderung mempunyai arti pembuktian, sehingga perbuatan keji yang dimaksud adalah perbuatan zina yang terbukti.

Dengan melihat *dlahir* hadits ini, *nusyuz* harus dipahami sebagai suatu fenomena pembangkangan istri terhadap suami secara lebih frontal sehingga berani berhubungan dengan lawan jenis di ranjang suaminya. Walaupun tindak pemukulan dibenarkan dalam Islam, ketika isteri berbuat *nusyuz* namun pemukulan ini bukan berarti tindak kekerasan, karena tujuan dari pemukulan ini bukanlah untuk menyakiti, melainkan untuk memberi pelajaran.

Berbeda halnya dengan pemukulan yang sampai mengakibatkan luka atau cedera, maka dapat dianggap sebagai kekerasan suami terhadap istri dan kepadanya dapat diaplikasikan hukuman yang diamanatkan oleh UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Karena, walaupun pemukulan tersebut adalah tindakan suami karena istrinya *nusyuz*, akan tetapi karena telah melewati batas yang diperbolehkan dalam Islam maka bisa dianggap sebagai sebuah kekerasan.

Sedangkan anak-anak sebagai objek pendidikan yang paling muda dalam sebuah rumah tangga harus diperlakukan dengan lembut sesuai karakter mereka sebagai anak-anak. Banyak hadits Nabi yang menganjurkan hal demikian. Akan tetapi berbeda ketika anak-anak tersebut akan lalai dalam mengerjakan sholat,

maka perintah untuk mengingatkan mereka dan mendidik mereka lebih keras dan lebih ditegaskan ketimbang perintah yang lain.

D. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Talak dimbil dari kata “*ithlaq*” yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan.¹⁷ Menurut istilah syara’, talak adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Sedangkan Menurut Abu zakaria Al-Anshari, talak adalah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.

Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri. Selain itu, talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.¹⁸

Jadi, talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak *Ba’in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya

¹⁷Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Cet. I; Bogor: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 191.

¹⁸M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 76.

jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak *raj'i*.¹⁹

2. Macam-Macam Talak

Ditinjau dari segi waktu menjatuhkannya talak, maka talak dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu:²⁰

- a. Talak Sunni ialah talak yang dijatuhkan sesuai tuntunan sunnah, yakni suami mentalak istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, yang dalam keadaan sucinya itu suami istri tidak mengadakan kontak seksual (bersetubuh).
- b. Talak Bid'i ialah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, yang dalam keadaan suci itu suami istri telah mengadakan persetubuhan.
- c. Talak la Sunni Wala Bid'i ialah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang belum pernah digauli, istri belum pernah haid atau istri yang telah lepas haid, dan talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.

Apabila talak dilihat dari segi cara mengucapkannya, maka talak terbagi kedalam dua bentuk yaitu:²¹

¹⁹M.A Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Cet. IV; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 230.

²⁰Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Cet. I; Bogor: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 193.

²¹Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Cet. I; Bogor: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 194.

- a. Talak Sharih yaitu talak yang diucapkan oleh suami secara jelas dan gamblang dengan kata-kata talak.
- b. Talak Kinayah yaitu talak yang diucapkan suami tanpa mempergunakan kata-kata talak secara tegas tetapi dengan sindiran yang dapat bermakna talak.

Ditinjau dari segi boleh tidaknya suami rujuk kembali setelah terjadinya talak atau perceraian, maka talak terbagi dua yaitu: ²²

- a. Talak Raj'i yaitu talak satu atau talak dua tanpa 'iwad (penebus talak) yang dibayar istri kepada suami yang dalam masa iddah, suami dapat merujuk kembali tanpa akad kepada istrinya.
- b. Talak Ba'in yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap istrinya dan untuk rujuk kembali harus melalui akad nikah baru lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.
 - 1) Ba'in sugra yaitu talak satu atau dua disertai dengan 'iwad dari istri kepada suami yang dengan akad nikah baru, suami dapat kembali rujuk dengan bekas istrinya.
 - 2) Talak Ba'in kubra yaitu talak tiga, suami tidak dapat memperistrikan lagi bekas istrinya kecuali bekas istrinya tersebut telah kawin lagi dengan laki laki lain yang kemudian bercerai setelah mengadakan hubungan seksual dan habis masa iddahanya.

²²Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Cet. V; Jakarta Universitas Indonesia Press, 1986), h. 103.

3. Rukun dan Syarat Talak

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud.

Rukun talak ada empat, sebagai berikut:²³

a. Suami

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Untuk sahnyanya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan berakal, baligh dan atas kemauan sendiri.

b. Istri

Untuk sahnyanya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan istri yang ditalak masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami dan kedudukan istri yang ditalak harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah.

c. Sighat Talak

Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran). Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap istrinya menunjukkan kemarahannya, semisal suami memarahi istri, memukulnya, mengantarkannya ke rumah orang tuanya, menyerahkan barang-barangnya tanpa disertai pernyataan talak, maka yang demikian itu bukan talak. Demikian pula dengan niat talak yang masih berada

²³Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Cet. I; Bogor: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 201-205;

dalam pikiran dan tidak diucapkan, maka itu tidak dipandang sebagai talak. Pembicaraan suami tentang talak tetapi tidak ditujukan terhadap istrinya juga tidak dipandang sebagai talak.

d. Qashdu (Sengaja)

Ucapan talak yang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak.

4. Sebab dan Alasan Perceraian

Secara umum sebab terjadinya perceraian ada empat,²⁴ yaitu:

1. Putusnya perkawinan sebab syiqaq

Syiqaq adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.

2. Putusnya perkawinan sebab pembatalan

Jika suatu akad perkawinan telah dilaksanakan dan dalam pelaksanaannya ternyata terdapat larangan perkawinan antara suami istri semisal karena pertalian darah, pertalian susuan, pertalian semenda, atau terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum seperti tidak terpenuhinya hukum dan syaratnya, maka perkawinan menjadi batal demi hukum melalui proses pengadilan, hakim membatalkan perkawinan yang dimaksud.

²⁴Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Cet. I; Bogor: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 241-248;

3. Putusnya perkawinan sebab fasakh

Hukum islam mewajibkan suami untuk menunaikan hak-hak istri dan memelihara istri dengan sebaik-baiknya, tidak boleh menganiaya istrinya dan menimbulkan kemudharatan terhadapnya. Suami dilarang menyengsarakan kehidupan istri dan menyia-nyiakan haknya.

Dengan keputusan Pengadilan atas dasar pengaduan karena kesengsaraan yang menimpa atau kemudharatan yang diderita, maka perkawinan dapat difasakhkan. Beberapa alasan fasakh, yaitu:

- a. Tidak adanya nafkah bagi istri.
- b. Terjadinya cacat atau penyakit.
- c. Penderitaan yang menimpa istri.

4. Putusnya perkawinan sebab meninggal dunia

Jika salah seorang dari suami atau istri meninggal dunia, atau kedua suami istri itu bersama-sama meninggal dunia maka menjadi putuslah perkawinan.

Dimaksudkan dengan mati yang menjadi sebab putusnya perkawinan dalam hal ini meliputi baik mati secara fisik, yakni memang dengan kematian itu diketahui jenazahnya, sehingga kematian itu benar-benar secara biologis, maupun kematian secara yuridis, yaitu dalam kasus suami yang *mafqud* (hilang tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia), lalu melalui proses pengadilan hakim dapat menetapkan kematian suami tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut;²⁵

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggar taklik talak.
- 8) Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

²⁵Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Gama Press, 2010), h. 28.

5. Akibat Putusnya Perkawinan

Apabila terjadi perceraian antara suami dan istri menurut hukum Islam maka akibat hukumnya adalah membebaskan kewajiban suami terhadap istri dan anak-anaknya, yaitu:²⁶

- 1) Memberi mut'ah yang pantas berupa uang atau barang.
- 2) Memberi nafkah hidup, pakaian, dan tempat kediaman selama bekas istri dalam masa iddah.
- 3) Memberi nafkah untuk memelihara dan pendidikan anaknya sejak bayi sampai dewasa dan dapat mandiri.
- 4) Melunasi mas kawin, perjanjian taklik talak dan perjanjian lain ketika perkawinan berlangsung dahulunya.

Dalam pasal 38 Undang-Undang RI No.1 tentang Perkawinan jo. pasal 113 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena; 1). kematian, 2). perceraian, 3). atas putusan pengadilan. Pada pasal 114 Kompilasi Hukum Islam disebutkan; putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pada pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib untuk:

- 1) Memberikan mut'ah yang layak terhadap istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul (belum berhubungan seksual).

²⁶Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Cet. III; Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), h. 179.

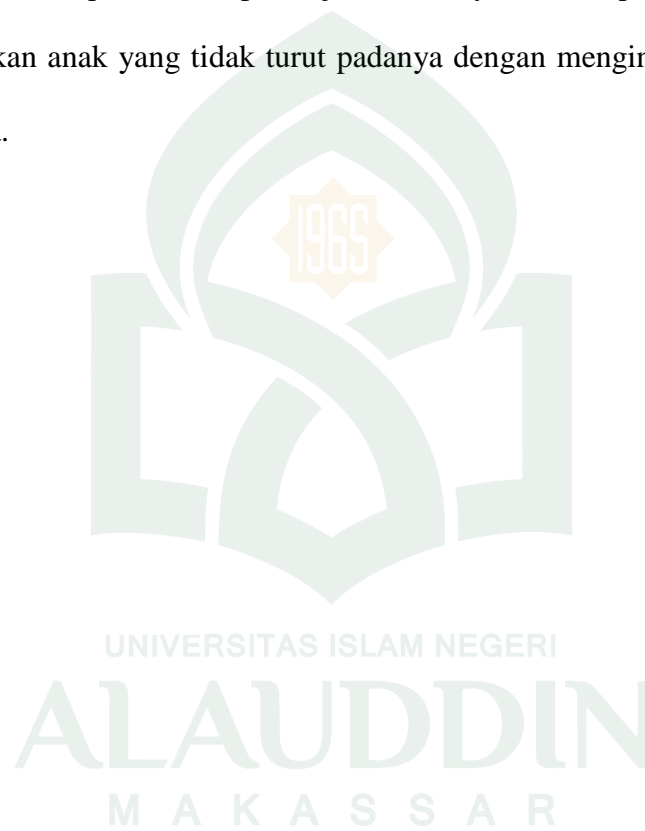
- 2) Memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam idah kecuali jika istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- 3) Wajib juga membayar seluruh mahar yang masih terhutang, dan separuh apabila qabla al-dukhul.
- 4) Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Adapun akibat perceraian yang terdapat pada pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:²⁷

- 1) Anak yang belum mumayyis berhak mendapat hadanah dari ibunya, jika ibunya sudah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibunya, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah, saudara wanita dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu dan ayah.
- 2) Anak yang sudah mumayis berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya.
- 3) Jika pemegang hadanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan. Pengadilan Agama dapat memindahkan pada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula.

²⁷Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Gema Press, 2010), h. 37.

- 4) Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, minimal sampai anak tersebut dewasa (21 tahun).
- 5) Jika terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama akan memberikan putusannya.
- 6) Pengadilan dapat menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya dengan mengingat kemampuan ayahnya.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Jenis Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi dan objek penelitian ini adalah dilakukan di Kabupaten Muna dengan objek penelitian Pengadilan Agama II Raha, untuk memperoleh informasi dan data mengenai perceraian dan sebab-sebab terjadinya perceraian dan yang terpenting adalah mendapatkan informasi atau data yang akurat mengenai Penghapusan KDRT dalam penyelesaian tindak penganiayaan terhadap istri sebagai alasan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Raha.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian lapangan (*field research*), atau hukum deskriptif yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang penghapusan KDRT dalam penyelesaian tindak penganiayaan terhadap istri sebagai alasan mengajukan perceraian berdasar Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT di Pengadilan Agama Kelas II Raha Kab. Muna. Setelah gambaran tersebut diperoleh, kemudian dianalisa secara kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus, yakni penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan memberikan gambaran mendalam terhadap seseorang, kelompok, suatu organisasi

atau lembaga terhadap fenomena-fenomena tertentu yang bertujuan untuk memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subyek yang diteliti. Dengan demikian penelitian studi kasus, lebih mengutamakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis. Menurut harfiahnya pendekatan yuridis adalah melihat atau memandang suatu hal yang ada dari aspek hukumnya terutama peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan sosiologis adalah sesuatu yang ada dan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang mempunyai akibat hukum.

Dengan demikian yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan cara pandang dari aspek hukum mengenai segala sesuatu yang terjadi di masyarakat yang berakibat hukum untuk dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

C. Pengumpulan Data

1. Jenis Data

Penelitian ini bercorak field research, oleh karena itu jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif. Data ini berkenaan dengan nilai kualitas.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data Pustaka melalui Library research yaitu metode yang dilakukan dengan cara membaca beberapa literatur atau bahan bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian, dalam hal ini bahan-bahan penelitian yang terkait dengan kepustakaan adalah:

1) Sumber data primer

Sumber data primer yaitu bahan yang sifatnya mengikat dan mendasari bahan hukum lainnya, diantaranya adalah :

- a) Undang-Undang RI Nomor. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT
- b) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c) Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, (Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).
- d) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- e) Kompilasi Hukum Islam.

2) Sumber data sekunder.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai sumber data primer. Adapun sumber data sekunder terdiri dari :

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan hukum perdata dan hukum acara perdata.

b) Literatur, dokumen, makalah-makalah, dan hasil riset yang relevan serta fakta-fakta lapangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Sumber data tersier

Sumber data tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

b. Data lapangan melalui Field research, yaitu bahan atau data yang diperoleh dari lapangan selain buku, kitab, majalah, jurnal dan lain-lain.

3. Metode pengumpulan data

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti mengenai fenomena objek penelitian diikuti dengan pencatatan sistematis terhadap semua gejala yang akan diteliti, observasi tidak hanya terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek yang lain. Dari segi prosesnya observasi dapat dibedakan menjadi observasi partisipan (peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang diamati), dan observasi non partisipan (tidak terlibat dan hanya sebagai peneliti independen), dan dari segi instrumentasi yang digunakan maka dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur (dirancang sistematis) dan tidak terstruktur (tidak dipersiapkan secara sistematis). Adapun teknik observasi yang digunakan dalam penelitian

ini adalah teknik observasi non partisipan dalam artian peneliti hanya mengamati masyarakat yang sedang menghadiri sidang perceraian di Pengadilan Agama Kelas II Raha tanpa mengikuti rangkaian persidangannya.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti dan jika peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden. Dengan demikian wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang “*Open ended*” (wawancara yang jawabannya tidak terbatas pada satu tanggapan saja) dan mengarah pada pedalaman informasi serta dilakukan tidak secara formal terstruktur.²⁸ Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan para pejabat di lingkungan Pengadilan Agama Kelas II Raha Kab. Muna guna memperoleh informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perceraian bagi pasangan nikah di bawah umur.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang monumental. Dokumen yang berbentuk tulisan seperti Akte, peraturan, kebijakan, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk gambar

²⁸Dedi Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 180.

seperti foto, video dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data dengan dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Adapun dokumen yang akan diteliti adalah dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan perceraian, seperti buku register perkara, akta cerai/putusan pengadilan, laporan bulanan, dan lain sebagainya.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan bertujuan untuk memperoleh data yang akurat tentang bagaimana pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Kelas II A Raha Kab. Muna. Adapun instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah Pedoman Wawancara yaitu Salah satu instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa daftar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk memperoleh data atau informasi tentang gugatan cerai istri dengan alasan KDRT di Pengadilan Agama Raha, bagaimana penerapan UNDANG-UNDANG RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dalam kasus KDRT di Pengadilan Agama Raha, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan penelitian ini. Informasi dapat diperoleh dengan wawancara langsung dan wawancara tertulis dengan para hakim dan panitera Pengadilan Agama Raha.

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam suatu penelitian, pengolahan data merupakan suatu kegiatan yang menjabarkan terhadap bahan penelitian, sehingga penulis mendapatkan data dari

hasil penelitian yang dilakukan kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu semua data yang diperoleh baik yang diperoleh di lapangan maupun yang diperoleh melalui kepustakaan setelah diseleksi dan disusun kembali kemudian disimpulkan secara sistematis. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengolahan data dengan jalan persentase melalui analisis statistik deskriptif.

Untuk membuktikan apa yang telah dikemukakan, maka dalam penelitian ini digunakan dua metode analisis, yaitu :

- a. Analisis Kualitatif, yaitu analisis yang menggunakan masalah tidak dalam bentuk angka-angka, tetapi berkenaan dengan nilai yang didasarkan pada hasil pengolahan data dan penilaian penulis.
- b. Analisis komparatif, yaitu metode yang dipergunakan untuk membandingkan data yang telah ada kemudian di tarik kesimpulan.

BAB IV

PENYELESAIKAN PERKARA PERCERAIAN BERDASAR PADA UNDANG-UNDANG RI NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KDRT DI PENGADILAN AGAMA RAHA SULAWESI TENGGARA

A. Penerapan UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Raha Kelas II Sulawesi Tenggara

Perkaran perceraian di Pengadilan Agama Raha dengan alasan KDRT di tahun 2016 yaitu²⁹ :

NO	BULAN	ALASAN KDRT	ALASAN LAIN	JUMLAH
1	JANUARI	20	4	24
2	FEBRUARI	10	4	14
3	MARET	12	1	13
4	APRIL	7	4	11
5	MEI	6	1	7
6	JUNI	3	3	7
7	JULI	0	7	7
8	AGUSTUS	0	0	0
9	SEBTEMBER	0	0	0
10	OKTOBER	0	0	0
11	NOVEMBER	0	0	0
12	DESEMBER	1	0	1
JUMLAH		59	25	84

²⁹Laporan bulanan penyebab terjadinya perceraian Pengadilan Agama Raha tahun 2016.

Ditable diatas terlihat bahwa alasan KDRT yang diajukan di Pengadilan Agama Raha mencapai 59 perkara dari 84 perkara yang masuk keseluruhan di Pengadilan Agama Raha, kalau dipersenkan menjadi 71% kasus perceraian. Dengan factor pengajuan yang beragam.

Ada beberapa faktor sehingga menyebabkan terjadinya pengajuan gugatan dengan alasan KDRT di Pengadilan Agama Raha yaitu:

1. Adanya kesenjangan sosial diakibatkan kurang baiknya hubungan komunikasi antara suami dan istri.³⁰

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan ujung dari relasi dalam rumah tangga yang kurang harmonis. Terutama relasi suami isteri yang selalu dalam keadaan konflik. Dalam perspektif teori sosial, paling tidak terdapat 4 (empat) pola relasi suami-isteri yang sedang berada dalam konflik. Pola interaksi suami-isteri yang sedang berada dalam keadaan konflik dalam empat pola yakni:

- a) Pola Eskalasi
- b) Pola Invalidasi
- c) Pola Menarik diri dan Menghindar
- d) pola Inteprestasi Negatif.³¹

Indikasi berakhirnya relasi suami-isteri, dalam perspektif teori sosial dilihat dalam 4 (empat) tahap. Keempat tahap ini, sesungguhnya merupakan sebuah model

³⁰Salinan Putusan Nomor 0111/Pdt.G/201/PA Rh.

³¹Stephen K. Sanderson, *Makro Sosiologi Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosiologi*, edisi kedua (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 230.

pengakhiran relasi (*relationship filtering*), sebagaimana diidentifikasi oleh yakni:

- a) Tahap diferensiasi (*deferentiating*)
- b) Tahap tersendat-sendat (*stagnating*)
- c) Tahap saling menjauh (*avoiding*)
- d) Tahap pengakhiran relasi (*terminating*)

Dalam konteks sosial, KDRT terkonstruksi selain karena adanya pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, namun juga terkonstruksi dari nilai-nilai yang dijadikan rujukan dalam suatu masyarakat.³²

2. Suami sering meminum-minuman keras, menyebabkan istri selalu dianiaya setiap pulang dari minum-minuman keras.³³

Dalam 10 salinan putusan yang penulis teliti semua tertera bahwa awal dari KDRT yang dilakukan suami adalah setelah meminum-minuman keras kemudian pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, kemudian melakukan kekerasan terhadap istri.

3. Suami menelantarkan istri dalam hal ekonomi, yang mengakibatkan istri harus banting tulang dalam menghidupi dirinya.

Setelah terjadinya puncak pertengkaran, ekonomi istri ditanggung oleh dirinya sendiri sehingga bisa dikatakan perempuan di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara mandiri dalam membiayai hidupnya.³⁴

³²Aloliliweri, *Gatra-Gatra Komunikasi Antar Budaya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 71.

³³Salinan Putusan Nomor 0177/Pdt.G/201/PA Rh.

³⁴Wawancara dengan Ramly Kamil, Mantan Hakim Ketua Pengadilan Agama Raha pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017 di kediaman, kelurahan pacnongang, kecamatan Somba Opu, Gowa.

4. Suami sering melakukan kekerasan, kekerasan psikis dan seksual.³⁵

Masyarakat Muna pada umumnya menganggap KDRT adalah tidak wajar dilakukan namun, kebiasaan terhadap minuman keras yang membuat pada umumnya masyarakat Muna sehingga melakukan KDRT

5. Suami telah menikah lagi dengan ketentuan adat tanpa sepengetahuan istri.³⁶

Ketentuan adat yang dimaksud ialah kebijakan kepala adat dalam memberi ijin suami yang melakukan poligami tanpa sepengetahuan istri.

6. Karakter budaya yang tidak berjalan selaras dengan agama dan UU.

Contohnya membayar biaya denda dengan *Boka'* (mata uang muna) kepada ketua adat dan perceraian sudah dapat dilegalkan, tanpa perlu pergi ke Pengadilan Agama Raha.³⁷

7. Mayoritas masyarakat Muna masih terbiasa dengan kata-kata yaitu tanpa *Kameko* (tuak) pekerjaan tak bakalan selesai.³⁸

Dilihat dari jumlah alasan perceraian dengan alasan KDRT dan Faktor mengajukan gugatan dengan alasan KDRT di Pengadilan Agama Raha dengan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT efektif dalam hal perdata sedangkan dalam hal pidana bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama yang membuat Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT tidak efektif.

³⁵ Salinan Putusan Nomor 0162/Pdt.G/201/PA Rh.

³⁶ Wawancara dengan Anwar, Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017 di Kantor Pengadilan Agama Kota Raha.

³⁷ Wawancara dengan Anwar, Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017 di Kantor Pengadilan Agama Kota Raha.

³⁸ Wawancara dengan Anwar, Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017 di Kantor Pengadilan Agama Kota Raha.

Mediasi sebagai upaya perdamaian yang dilakukan untuk mendamaikan para pihak tidak terlalu memberi upaya besar dalam putusan, karena dalam 10 putusan yang diteliti hanya satu putusan yang dihadiri oleh tergugat, 9 putusan lainnya diputus dengan *versteg*. Sehingga pertimbangan hakim selalu melihat pada *masalahat* yang diberikan pada kedua belah pihak apabila itu jalan terakhir untuk membrrikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT di Kabupaten Muna.

B. Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perceraian dengan alasan KDRT

a. Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Cerai Gugat Akibat KDRT di Pengadilan Agama Raha

Untuk mengetahui pertimbangan hakim pada penyelesaian kasus-kasus perceraian akibat KDRT peneliti merangkum data-data yang diperoleh baik melalui data wawancara langsung dengan hakim Pengadilan Agama Raha maupun berdasarkan telaah dokumen putusan. Berdasarkan telaah peneliti terhadap dokumen putusan Pengadilan Agama Raha tahun 2016 tampak bahwa pada kasus perceraian akibat KDRT pertimbangan hakim dalam putusan selalu dikembalikan pada alasan percekcoan dan perselisihan. Atas hal tersebut Anwar, salah seorang hakim di Pengadilan Agama Raha, mengatakan:

“Persoalan KDRT terkadang tidak ditonjolkan sebagai penyebab perceraian karena umumnya kasus-kasus yang ada dapat dikategorikan dalam percekcoan dan tidak bisa dirukunkan lagi sehingga itulah yang

dijadikan sebagai pertimbangan utama. Demikian halnya pada pasal 116 KHI alasan perceraian tidak dibahasakan dengan KDRT'.³⁹

Sedangkan menurut Muhammad Arif Hakim:

Alasan perceraian sudah terpola secara normatif dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 yang kemudian dipertegas dalam KHI. Pada alasan-alasan tersebut tidak disebutkan secara tegas KDRT tetapi ada alasan penganiayaan di huruf (d). Sementara alasan di huruf (f) yakni perselisihan dan percekocokan merangkul semua alasan di atasnya.⁴⁰

Adapun menurut Sulastri, hakim sekaligus Agama Raha:

Hakim dalam memeriksa dan memutus sesuai alasan yang diajukan. Dalam pemeriksaan, yang dibuktikan adalah alasan pokok dan rata-rata alasan pokok adalah perselisihan.⁴¹

Tampaknya itulah yang mendasari para hakim sehingga lebih menonjolkan perselisihan dan percekocokan sebagai pertimbangan dalam putusan.

Sementara istilah perselisihan itu sendiri oleh hakim didefenisikan secara luas sebagaimana dalam Salinan Putusan Nomor 0162/Pdt.G/2016/PA Rh:

“Menimbang bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling

³⁹Wawancara dengan Anwar, Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017 di Kantor Pengadilan Agama Kota Raha.

⁴⁰Wawancara dengan Muhammad Arif, Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017 di Kantor Pengadilan Agama Kota Raha.

⁴¹Wawancara dengan Sulastri, Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017 di Kantor Pengadilan Agama Kota Raha.

*melindungi dengan ditemukannya fakta antara penggugat dan tergugat telah pisah ranjang menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan pengertian serta sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga”.*⁴²

Berdasar dari keumuman definisi tersebut tampaknya memang semua kasus perceraian bisa dikategorikan sebagai kasus perselisihan. Adapun motif perselisihan tersebut seperti KDRT dinyatakan sebagai sebab dari perselisihan sebagaimana dalam Salinan Putusan Nomor 0169/Pdt.G/2011/PA.Rh:

*“Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara penggugat dan tergugat adalah tergugat ringan tangan suka memukul penggugat, tergugat cemburu berlebihan, dalil alasan sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan penggugat”.*⁴³

Jadi jelaslah mengapa kasus-kasus perceraian yang sebenarnya bermotif KDRT tetapi kemudian lebih dibahasakan sebagai perselisihan, disamping juga adanya sebab-sebab lain misalnya dari penggugat sendiri yang memilih untuk tidak menonjolkan KDRT-nya dengan berbagai pertimbangan. Menurut Sulastri:

“Biasanya juga dari penggugat sendiri yang tidak begitu menonjolkan KDRT-nya karena merasa takut dan pembuktiannya susah. Ada juga yang

⁴²Salinan Putusan Nomor 0162/Pdt.G/201/PA Rh. h. 8.

⁴³Salinan Putusan Nomor 0169/Pdt.G/2016/PA Rh. h. 8.

*menganggapnya sebagai aib keluarga. Bisa juga karena ada saksi yang takut ke pengadilan. Ada juga yang mengkhawatirkan dampaknya akan ke anak kalau nanti anak-anak mereka akan membaca putusan tersebut mereka akan tahu bagaimana bapaknya”.*⁴⁴

Selanjutnya menurut Anwar bahwa “Alasan huruf (f) yakni perselisihan selalu disertakan sebagai pertimbangan karena tidak ada penganiayaan tanpa percekocokan”.⁴⁵

Demikianlah alasan-alasan dari hakim sehingga dalam putusan KDRT selalu dikategorikan dalam perselisihan meskipun juga kadang-kadang pembuktian adanya KDRT tetap dimasukkan dalam pertimbangan sebagaimana dalam Salinan Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2012/PA.Rh:

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 September 2004, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu anak, namun sejak akhir Oktober 2004 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan bila terjadi pertengkaran Tergugat selalu melakukan KDRT dan sejak tanggal 24 Juni 2006 Tergugat telah pergi meninggalkan

⁴⁴Wawancara dengan Sulastri Suhani, Hakim Pengadilan Agama Raha pada tanggal Senin, 19 Juni 2017 di Kantor Pengadilan Agama Kota Raha.

⁴⁵Wawancara dengan Anwar, Hakim Pengadilan Agama Raha pada tanggal Senin, 19 Juni 2017 di Kantor Pengadilan Agama Kota Raha.

*Penggugat dan kembali ke rumah orangtua Tergugat hingga sekarang sudah lebih 9 tahun dan tidak saling menghiraukan lagi;*⁴⁶

Alasan telah terjadinya perselisihan kemudian selalu digandengkan dengan sudah tidak adanya harapan untuk merukunkan kembali sebagaimana dalam Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2016/PA Rh:

Menimbang, bahwa terbukti setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2006, karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan bahkan saat ini Tergugat telah kawin dengan perempuan lain, hal ini bertentangan Pasal 5 dan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 5 berbunyi bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. Kekerasan psikis; c. Kekerasan seksual; atau d. Penelantaran rumah tangga”;

Menimbang, bahwa selain itu terbukti pula Tergugat telah menelantarkan Penggugat selama 1 tahun 9 bulan, hal ini bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) berbunyi: “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”;

⁴⁶Salinan Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2016/PA Rh. h. 7-8.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan bilamana perkawinannya tetap dipertahankan, maka madharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf (a, f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a, f) Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam se rumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup dan rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (a, dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a, dan f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagaimana petitum pertama gugatan;⁴⁷

Jadi bagi hakim jika sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali akan lebih maslahat jika diceraikan saja. Pertimbangan kemaslahatan sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam putusannya kadang-kadang juga diperkuat dengan kaidah fikih “Menolak kerusakan harus diutamakan daripada menolak kemafsadatan” sebagaimana dalam Salinan Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2016/PA Rh:

⁴⁷Salinan Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2016/PA Rh. h. 11-12.

Menimbang bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan Mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencapai maslahatnya sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi “Dar’ al-mafâsid muqaddam ‘alâ jalb al-mashâlih” yang artinya “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.⁴⁸

Terkait dengan kemaslahatan pula hakim kadang-kadang mengutip Hadis Nabi Saw tentang keharusan melenyapkan kemudaratannya yang telah dikukuhkan menjadi kaidah fikih tersendiri sebagaimana dalam Salinan Putusan No. 426 /Pdt.G/2011/PA Kdi:

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan sabda Rasulullah Saw. dalam sebuah riwayat “*Lâ dharara wa lâ dhirîra*” yang artinya “Tidak boleh membuat mudarat bagi orang lain dan tidak boleh ada yang dimudaratkan”. Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang lebih baik perkawinan penggugat dan tergugat tersebut tidak dilanjutkan guna menghindarkan timbulnya kemudaratannya yang lebih banyak lagi yang tidak diinginkan. Pertimbangan tersebut diperkuat oleh pernyataan dari hakim Ramly Kamil sekaligus mantan ketua Pengadilan Agama Raha bahwa:

⁴⁸Salinan Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2016/PA Rh. h. 11.

*“Kalau sudah terjadi pertentangan suami istri yang dikhawatirkan sudah melanggar norma-norma agama, hakim sudah bisa menceraikan”.*⁴⁹

Sedangkan pertimbangan terhadap kemaslahatan anak lebih banyak pada sisi materilnya yakni menyangkut biaya pemeliharaan anak pasca perceraian. Menurut hakim Ramly Kamil bahwa:

*“Untuk pemeliharaan anak pasca perceraian tidak bisa di ex officio tanpa diminta atau dituntut oleh penggugat dalam dalil gugatannya, karena menurut beliau yang bisa di ex officio oleh Hakim hanya nafkah iddah dan mut’ah dari mantan suami penggugat”.*⁵⁰

Namun menyangkut tentang tanggung jawab nafkah tersebut salah satu temuan peneliti selama meneliti di Pengadilan Agama Raha adalah para istri yang bercerai umumnya telah memiliki kemandirian dalam hal ekonomi sehingga boleh jadi mereka berani memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian karena dari sisi ekonomi mereka cukup bisa mengatasinya sendiri. Bahkan pada berbagai kasus berdasarkan pengakuan istri tampak bahwa selama hidup bersama pun justru suami yang bergantung kepada istri dalam urusan nafkah keluarga. Dalam hal ini telah terjadi pergeseran mind set masyarakat mengenai suami sebagai sumber nafkah utama dalam keluarga.

b. Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Hakim terhadap Kasus-Kasus Perceraian Akibat KDRT

⁴⁹Wawancara dengan Ramly Kamil, mantan Hakim Pengadilan Agama Raha sekarang bertugas di Pengadilan Agama Watampone pada tanggal Senin, 10 Juni 2017 di Kantor Pengadilan Agama Kota Raha.

⁵⁰Wawancara dengan Ramly Kamil, mantan Hakim Pengadilan Agama Raha sekarang bertugas di Pengadilan Agama Watampone pada tanggal Senin, 10 Juni 2017 di Kantor Pengadilan Agama Kota Raha.

Ditinjau dari sisi hukum dan keprofesian hakim jelas bahwa independensi atau kemandirian hakim pada hakikatnya diikat dan dibatasi oleh rambu-rambu tertentu. Batasan atau rambu-rambu yang harus selalu diingat dalam implementasi kebebasan ini adalah terutama aturan-aturan hukum itu sendiri. Ketentuan-ketentuan hukum, baik segi procedural atau formil maupun substansial atau materiil itu sendiri sudah merupakan batasan bagi kekuasaan kehakiman agar dalam melakukan independensinya tidak melanggar hukum dan bertindak sewenang-wenang.

Hakim adalah subordinat pada hukum dan tidak dapat bertindak *contra legem*. Namun harus disadari pula bahwa kebebasan dan independensi tersebut diikat pula dengan pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Jadi antara independensi dan akuntabilitas ibarat dua sisi koin yang saling melekat. Tidak ada kebebasan mutlak tanpa tanggungjawab. Dapat dipahami bahwa konteks kebebasan hakim haruslah diimbangi dengan akuntabilitas peradilan. Bentuk tanggungjawab ada dengan berbagai macam mekanismenya namun yang paling perlu disadari adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat karena pada dasarnya tugas badan-badan kehakiman atau peradilan adalah melaksanakan pelayanan publik dalam memberikan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.⁵¹

Oleh karena itu, untuk menilai sebuah putusan yang dibuat oleh hakim tidak berhenti pada tataran kesesuaiannya dengan norma-norma hukum semata tetapi juga harus dilihat dalam kerangka yang lebih luas yakni terkait dengan tugas peradilan dalam mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Atas

⁵¹ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2012), Edisi I, Cet. I, h. 172.

dasar itu hakim dalam membuat sebuah putusan hukum harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan matang yang dapat dipertanggungjawabkan secara normatif maupun sosiologis-filosofis. Di sinilah relevansinya dengan prinsip kemaslahatan sebagai tujuan hukum Islam (*maqâshid al-syarî'ah*). Apalagi mengingat putusan hakim (pengadilan) merupakan salah satu dari empat produk hukum Islam di Indonesia selain fikih, undang-undang dan fatwa. Oleh karena itu putusan hakim memiliki posisi yang sangat penting dan harus selalu mendapatkan perhatian tersendiri. Khusus terhadap putusan-putusan di Pengadilan Agama Raha, mencermati pertimbangan-pertimbangan hakim sebagaimana telah dipaparkan, peneliti dapat memetakan bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut meliputi pertimbangan hukum (materil maupun formil), pertimbangan fakta yang terungkap di persidangan dan pertimbangan kemaslahatan. Menyangkut pertimbangan-pertimbangan secara hukum, materil maupun formil, peneliti melihat sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada.

Dalam amatan peneliti, UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) sudah dijadikan pertimbangan dari segi perundang-undangan, sebagai yang tertera didalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2010 disebutkan bahwa UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) merupakan salah satu hukum materil di pengadilan agama dan mahkamah syar'iyah.⁵²

⁵²Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi 2010*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2011), h. 55.

Sementara pertimbangan dari sisi fakta di persidangan, khususnya mengenai tidak dibantahnya dalil-dalil penggugat, hal itu umumnya terjadi karena tergugat (suami) tidak hadir dan tidak juga mengutus kuasa untuk mewakili mereka dalam mengikuti persidangan di pengadilan. Berdasarkan telaah terhadap 10 dokumen putusan tahun 2016 yang peneliti jadikan sampel, hanya 1 kasus yang tergugatnya hadir di persidangan sedangkan sisanya terpaksa diputus dengan putusan *verstek* (tanpa kehadiran tergugat atau kuasanya).

Adapun mengenai pertimbangan kemaslahatan, hakim selalu berasumsi bahwa dalam suasana rumah tangga yang sudah tidak harmonis yang selalu diwarnai percecokan, perselisihan, pertengkaran, tidak saling memperdulikan, apalagi sampai terjadi tindakan penganiayaan, bagi hakim perceraian merupakan solusi terbaik untuk menghindari kemafsadatan yang lebih besar dengan alasan bahwa dalam suasana seperti itu tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga *sakînah mawaddahwarahmah* sudah sangat sulit. Jika dipertahankan maka mudaratnya akan jauh lebih besar daripada maslahatnya. Meski telah dijadikan sebagai dasar pertimbangan namun pertimbangan kemaslahatan dalam banyak putusan diterapkan secara umum saja yakni perceraian sebagai solusi terbaik atas permasalahan yang ada. Prinsip ini diterapkan pada hampir semua kasus yang sebenarnya masing-masing memiliki spesifikasi tersendiri jika dielaborasi lebih mendalam. Apalagi menyangkut kasus KDRT, kemaslahatan dan kemudharatan bisa saja dijabarkan secara khusus berdasarkan kerangka *dharûriyyât al-khamsah* :

1. Menjaga Agama
2. Memelihara Jiwa

3. Memelihara Akal
4. Memelihara Keturunan
5. Memelihara Harta

Sebagai penjabaran *maqâshid al-syarî'ah*, misalnya menyangkut keselamatan hidup (jiwa) istri sebagai korban. Apalagi memang cukup banyak kasus yang mengancam jiwa istri yakni penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam seperti golok dan skopan atau tindakan berbahaya lainnya seperti memasukkan kunci tang ke alat kelamin istri sampai berdarah-darah sebagaimana terungkap dalam salah satu sampel kasus penelitian ini. Merujuk pada pendapat fukaha, perceraian dalam kasus seperti ini dapat dikategorikan sebagai perceraian karena *dharar* atau membahayakan, Menurut Imâm Mâlik jika istri mendapat perlakuan kasar dari suaminya maka ia dapat mengajukan gugatan perceraian ke hadapan hakim. Adapun bentuk *dharar* tersebut adalah suami suka memukul, mencaci, menyakiti badan istri dan memaksa istrinya berbuat munkar.⁵³

Demikian halnya dampak psikis terhadap anak-anak yang dalam berbagai kasus terkadang mereka menyaksikan sendiri tindakan kekerasan yang dilakukan bapaknya kepada ibunya sehingga dikhawatirkan akan berdampak secara serius pada perkembangan si anak. Bagi anak laki-laki, dikhawatirkan akan mempengaruhi pembentukan karakternya sehingga besar peluangnya ia akan menjadi pelaku KDRT pula. Dalam berbagai penelitian terungkap bahwa umumnya pelaku KDRT berasal dari asuhan keluarga KDRT juga. Sementara

⁵³Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bayrût: al-Risâlah, Cet. III, 2009 M/1430 H), h. 295.

kalau ia anak perempuan bisa jadi akan menyisakan trauma mendalam dalam jiwanya takut menikah setelah dewasa.

Demikian besarnya dampak terhadap anak-anak sehingga hal itu harus menjadi perhatian khusus. Jika dikaitkan dengan *maqâshid al-syarî'ah* maka hal itu terkait dengan *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa) dan *hifz al-nasl* (memelihara keturunan) yang dalam hukum Islam mendapat perhatian penting. Hal inilah yang seharusnya dijabarkan oleh hakim secara lebih rinci supaya terasa benar-benar kedalaman putusannya. Namun khusus di Pengadilan Agama Raha, tampaknya hal yang dipertimbangkan. Khususnya kemaslahatan anak selalu dilihat hanya dari sisi materilnya saja. Umumnya putusan-putusan yang terkait dengan anak hanya menyangkut tanggung jawab nafkah *hadhânah* yang harus dipenuhi suami pasca perceraian. Sebagai contoh, Undang-Undang PKDRT merinci berbagai bentuk kekerasan sementara Undang-Undang Perkawinan hanya mengakomodir kekerasan fisik. Akibatnya kekerasan selain kekerasan fisik dimasukkan dalam kategori perselisihan yang menurut peneliti terlalu menyederhanakan permasalahan. Hal ini juga sangat berpengaruh terhadap upaya pemecahan problem perceraian yang semakin meningkat dari waktu ke waktu yang otomatis harus berangkat dari faktor-faktor penyebab perceraian tersebut. Oleh karena itu maka ke depan hal-hal seperti ini harus menjadi perhatian bersama khususnya pihak-pihak yang berkompeten yakni kaum eksekutif dan legislatif demi terwujudnya kepastian hukum di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) termaksud wewenang Peradilan Agama, bergandengan dengan peraturan-peraturan lain, namun kewenangan mengadili dari Pengadilan Agama hanya terkait hal perdata yang tercantum didalam UU tersebut saja, sehingga kewenangan Pengadilan Agama untuk memberikan perlindungan hukum hanya memutuskan perceraian, terlihat bahwa UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tidak berjalan efektif dari sisi pidana oleh karena bukan kewenangan Pengadilan Agama.

Kasus-kasus perceraian di Pengadilan Agama Raha akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terdiri atas berbagai jenis kekerasan. Ada yang bermotif kekerasan fisik, psikis, penelantaran dan seksual. Namun ada juga dalam satu kasus meliputi berbagai jenis kekerasan. Banyaknya kasus tersebut menjadi indikasi banyaknya kasus KDRT di Kota Raha selama ini dan mungkin masih banyak lagi yang tidak terungkap. Sedangkan penyebab terjadinya KDRT, terutama kekerasan fisik, dilatarbelakangi oleh berbagai sebab antara lain cemburu, faktor ekonomi, perselingkuhan dan lain-lain. Namun penyebab terbanyak yang peneliti temukan dalam penelitian ini adalah suami selalu minum minuman keras.

Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam penyelesaian kasus-kasus perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Raha umumnya terdiri atas pertimbangan hukum (materil dan formil) dan pertimbangan fakta yang terungkap di persidangan yang dalam banyak kasus hakim berkesimpulan sudah tidak terjalin ikatan batin sehingga tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan pernikahan. Sedangkan pertimbangan kemaslahatan cenderung bersifat umum yakni bilamana suasana kehidupan rumah tangga sudah tidak kondusif sehingga jika tetap diteruskan dikhawatirkan akan mendatangkan kemudharatan daripada kemaslahatan maka lebih baik diceraikan.

Pertimbangan ini diberlakukan sama pada hampir semua kasus padahal setiap kasus memiliki karakteristik masing-masing. Hakim bisa saja menggali lebih dalam lagi berdasarkan prinsip-prinsip *maqâshid al-syarî'ah* khususnya yang terkait dengan *hifzh al-nafs* bagi istri dan *hifzh al-nasl* bagi anak.

B. Saran-Saran

1. Dalam pertimbangan Hakim untuk kiranya mempertimbangkan jenis-jenis kekerasan yang tertera didalam UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT yaitu kekerasan seksual, kekerasan psikis maupun penelantaran rumah tangga (selain dari pada kekerasan fisik) hanya dimasukkan dalam kategori perselisihan yang menurut peneliti terlalu menyederhanakan permasalahan, sehingga terlihat seperti menyederhanakan alasan Perceraian. Karena dampak yang paling psikis paling dirasakan oleh korban terutama istri dan anak.

2. Sebaiknya pelaksana tugas *Trias Politica* yaitu: Lembaga Legislatif, yudikatif, dan eksekutif agar mengusut kembali dan menentukan alasan perceraian sehingga dalam penyelesaian masalah perceraian di Pengadilan Agama dengan alasan KDRT dapat memberikan efek jera bagi pelaku KDRT.
3. Dalam hal melaksanakan tugas dan wewenang hakim dalam memutus perkara seharusnya diberikan ruang gerak dengan UU PKDRT agar supaya lebih dapat menjadi pertimbangan untuk memberi efek jera bagi pelaku KDRT.



DAFTAR PUSTAKA

- Aloliliweri, *Gatra-Gatra Komunikasi Antar Budaya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Asghar, Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoro, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet. I; Bogor: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2003.
- Irianto, Sulistyowati dan Cahyadi, Antonius. *Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana Studi Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kamil, Ahmad, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta: Kencana, 2012, Edisi I, Cet. I.
- Khaerlie, Ahmad Tolabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- KBBI offline. Versi 1.2. Ebita Setiawan. Pusat Bahasa: KBBI Daring Edisi III. 2010.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi 2010*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2011.
- Mahali A. Mudjab, *Asbabun Nuzul Studi Pendalaman al-Qur'an*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, Cet I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- MK, M. Anshary. *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Mharta, Aroma Emina, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Jakarta: UII Press, 2003.
- Mulyana, Dedi, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Ashari Akmal. *Hukum perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UNDANG-*

UNDANG.No.1/1974 Sampai KHI. Cet.I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.

Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam Studi Analisis dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.* Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Republik Indonesia. *Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.* Jakarta; Gama Press., 2010.

------. *Undang-Undang RI No.7 tahun 1989 tentang Undang-Undang Peradilan Agama.* Jakarta; Gama Press, 2010.

------. *Undang-Undang RI nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI no.7 tahun 1989 tentang peradilan Agama.* Jakarta; Gama Press, 2010.

------. *Kompilasi Hukum Islam.* Jakarta; Gama Press, 2010.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Salinan Putusan Pengadilan Agama Raha Nomor 0082/Pdt.G/2016/PA.Rh.

Salinan Putusan Pengadilan Agama Raha Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.Rh.

Salinan Putusan Pengadilan Agama Raha Nomor 0108/Pdt.G/2016/PA.Rh.

Salinan Putusan Pengadilan Agama Raha Nomor 0110/Pdt.G/2016/PA.Rh.

Salinan Putusan Pengadilan Agama Raha Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Rh.

Salinan Putusan Pengadilan Agama Raha Nomor 0162/Pdt.G/2016/PA.Rh.

Salinan Putusan Pengadilan Agama Raha Nomor 0169/Pdt.G/2016/PA.Rh.

Salinan Putusan Pengadilan Agama Raha Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA.Rh.

Salinan Putusan Pengadilan Agama Raha Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.Rh.

Salinan Putusan Pengadilan Agama Raha Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Rh.

- Sayyid Muhammad Husain at-Tabatha'I, *Al-Mizan fi al-Tafsir*, Lebanon : al-'Alami, t.t.
- Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bayrût: al-Risâlah, Cet. III, 2009 M/1430 H).
- Stephen K. Sanderson, *Makro Sosiologi Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosiologi*, Edisi kedua, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Syekh ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu*, Jilid II; Kairo, Jami'ah al-azhar.
- Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Prespektif Yuridis-viktimologis*. Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- SionlaEloE, Libby, Soekrisman, Tri dan SionlaEloE, Paul. *Jalan Panjang Menuju Keharmonisan Rumah Tangga*. Nusa Tenggara Timur: Rumah Perempuan Kupang, 2011.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Syahrani, Andi. *Bimbingan Keluarga Sakinah*. Makassar: Alauddin Press, 2013.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Tihani, M.A dan Sahrani, Sohri. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- T. Jafizham. *Peranan Pengadilan Agama dalam Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Depag, 1985.
- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian*. Makassar: Alauddin Press, 2013.
- Zuhaili Wahbah, *Tafsir al-Munîr*, juz V, Lebanon: Darul Fikr.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pengadilan Agama Raha



Keluarga besar Pengadilan Agama Raha



Hakim Pengadilan Agama Raha



LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA RAHA
Bulan Januari 2016

NO	PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN													
	ZINA	MABUK	MADAT	JUDI	MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	DIHUKUM PENJARA		KDRT	CACAT BADAN	PESELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI	JUMLAH
							POLIGAMI							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	0	0	0	0	2	0	0	20	0	2	0	0	0	24

Raha, 29 Januari 2016
Ketua Pengadilan Agama Raha
Des. H. Ramli Kamil, MH
NIP. 196409121994031002

LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA RAHA
Bulan Februari 2016

PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN														
NO	ZINA	MABUK	MADAT	JUDI	MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	DIHUKUM PENJARA	POLIGAMI	KDRT	CACAT BADAN	PESELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	0	0	0	0	1	0	0	10	0	3	0	0	0	14

Raha, 29 Februari 2016
Ketua Pengadilan Agama Raha
Des. H. Ramli Kamil, MH
NIP. 196409121994031002

LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA RAHA
Bulan Maret 2016

PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN														
N O	ZINA	MABUK	MADAT	JUDI	MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	DIHUKUM PENJARA	POLIGAMI	KDRT	CACAT BADAN	PESELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	0	0	0	0	1	0	0	12	0	0	0	0	0	13

Raha, 31 Maret 2016
Ketua Pengadilan Agama Raha
Des. H. Ramli Kamil, MH
NIP. 196409121994031002

LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA RAHA
Bulan April 2016

bulan April 2016

PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN														
NO	ZINA	MABUK	MADAT	JUDI	MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	DIHUKUM PENJARA	POLIGAMI	KDRT	CACAT BADAN	PESELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	0	0	0	0	3	0	0	7	0	1	0	0	0	11

Raha, 29 April 2016
Ketua Pengadilan Agama Raha
Des. H. Ramli Kamil, MH
NIP. 196409121994031002

LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA RAHA
Bulan Mei 2016

NO	PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN													
	ZINA	MABUK	MADAT	JUDI	MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	DIHUKUM PENJARA	POLIGAMI	KDRT	CACAT BADAN	PESELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	1	7

Raha, 31 Mei 2016
Ketua Pengadilan Agama Raha
Drs. H. Ramly Kamil, MH
NIP. 196409121994031002

LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA RAHA
Bulan Juni 2016

NO	PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN													
	ZINA	MABUK	MADAT	JUDI	MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	DIHUKUM PENJARA	POLIGAMI	KDRT	CACAT BADAN	PESELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	0	0	0	0	2	0	0	3	0	2	0	0	0	7

Raha, 30 Juni 2016
Ketua Pengadilan Agama Raha
Drs. H. Ramly Kamil, MH
NIP. 196409121994031002

LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA RAHA
Bulan Juli 2016

NO	PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN													
	ZINA	MABUK	MADAT	JUDI	MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	DIHUKUM PENJARA	POLIGAMI	KDRT	CACAT BADAN	PESELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7

Raha, 29 Juli 2016
Ketua Pengadilan Agama Raha
Drs. H. Ramly Kamil, MH
NIP. 196409121994031002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALA UDDIN
MAKASSAR

LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA RAHA
Bulan Agustus 2016

NO	PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN													
	ZINA	MABUK	MADAT	JUDI	MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	DIHUKUM PENJARA	POLIGAMI	KDRT	CACAT BADAN	PESELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														0

Raha, 31 Agustus 2016
Ketua Pengadilan Agama Raha
Drs. H. Ramly Kamil, MH
NIP. 196409121994031002

LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA RAHA
Bulan September 2016

NO	PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN													
	ZINA	MABUK	MADAT	JUDI	MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	DIHUKUM PENJARA	POLIGAMI	KDRT	CACAT BADAN	PESELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														0



LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA RAHA
Bulan Oktober 2016

NO	PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN													
	ZINA	MABUK	MADAT	JUDI	MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	DIHUKUM PENJARA	POLIGAMI	KDRT	CACAT BADAN	PESELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														0



LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA RAHA
Bulan November 2016

NO	PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN													
	ZINA	MABUK	MADAT	JUDI	MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	DIHUKUM PENJARA	POLIGAMI	KDRT	CACAT BADAN	PESELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														0



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALA UDDIN
MAKASSAR

LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA RAHA
Bulan Desember 2016

NO	PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN													
	ZINA	MABUK	MADAT	JUDI	MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	DIHUKUM PENJARA	POLIGAMI	KDRT	CACAT BADAN	PESELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1





PENGADILAN AGAMA RAHA

Jalan Gatot Subroto, Poros Raha - Tampo
Telp. 0403 – 2523238 / Fax. 0403 – 2523237
website : <http://www.pa-raha.go.id>

e-mail : pa_raha@yahoo.com dantabayyunparaha3@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W21-A4/ 593 /HM.00/VI/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Agama Raha :

Nama : **Sitti Rusiah, S.Ag, M.H**
NIP : 19651005 198503 2 003
Pangkat/Gol : Pembina Tk I, IV/b
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Raha

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **Lauhin Mahfudz Kamil**
NIM : 10100113036
Fakultas : Syari'ah dan Hukum Peradilan
Judul Penelitian : Efektivitas UU RI Nomor 23 Tahun 2004
Penghapusan KDRT dalam menyelesaikan
Perceraian di Pengadilan Agama Raha Kelas II

Untuk melakukan Penelitian di Kantor Pengadilan Agama Raha mulai tanggal
19 Juni s.d 29 Juli 2017.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.



Raha, 19 Juni 2017

Wakil Ketua

Sitti Rusiah, S.Ag, M.H
Nip. 19651005 198503 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

*Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 864928-864930 Fax. 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa - Gowa Telp. 841879 Fax 8221400*

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 108 Tahun 2017
TENTANG
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI
TAHUN 2017

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan :
Nama : Lauhin Mahfudz Kamil
N I M : 10100113036
Jurusan : Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan
Hari/Tanggal : Senin, 7 Agustus 2017
Prihal : Ujian Munaqasyah/Skripsi
Judul : "Efektifitas UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Raha Kelas II Sulawesi Tenggara"
- A**
Menimbang : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Munaqasyah/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Junto Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
Sekretaris : Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag.
Penguji I : Dr. H. Supardin, M.H.I.
Penguji II : Dra. Hj. Hartini Tahir, M.H.I.
Pelaksana : 1. Mujahidah, S.E.
2. Nurhayati Wahid
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : 2 Agustus 2017

Dekan,

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
NIP. 19621016 199003 1 003

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 305 Tahun 2017
TENTANG
PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI (KOMPREHENSIF)
TAHUN 2017


Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat permohonan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tingkat Akhir Jurusan/Program Studi Hukum Acara Peradilan Dan Kekeluargaan (HAPK) tanggal 17 Juli 2017 perihal Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif, maka dipandang perlu menetapkan Panitia, Penguji dan Peserta Ujian;
b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahi tugas sebagai Panitia, Penguji dan Peserta Ujian.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI. Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bebas Anggaran dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 20 tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Junta Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar.
8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF**
- Pertama** : Menetapkan Panitia, Penguji dan Peserta Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
Kedua : Tugas Panitia mempersiapkan segala instrumen yang berkaitan dengan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
Ketiga : Tugas Penguji melaksanakan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
Keempat : Tugas Panitia dan Penguji dianggap selesai setelah berakhirnya Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
Kelima : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SURAT KEPUTUSAN ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : 17 Juli 2017
Dekan

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :

Vth Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata - Gowa

Nomor : SI.1/PP.00.946/2017
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : UNDANGAN SEMINAR HASIL

Samata, 21 Juli 2017

Kepada

- Yth.*
1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag (Ketua)
 2. Dr. H. Supardin, M.HI. (Sekretaris)
 3. Dr. H. Supardin, M.HI. (Penguji I)
 4. Dra. Hj. Hartini Tahir, M.HI (Penguji II)
 5. Dr. H. Abd.Halim Talli, M.Ag (Pembimbing I)
 6. Drs.H. Jamal Jamil, M.Ag (Pembimbing II)
 7. Pelaksana

Di
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Seminar Hasil/Skripsi atas nama :

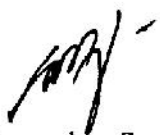
Nama : Lauhin Mahfudz Kamil
N I M : 10100113036
Jurusan : Hukum Acara Peradilan & Kekeluargaan (HAPK)

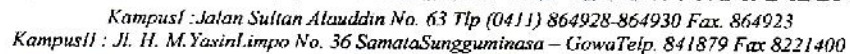
Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/(i) pada Ujian Seminar Hasil/Skripsi, insya Allah Dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juli 2017
Waktu : Pukul 11.00 - 12.00 Wita
Tempat : Ruang Jurusan HAPK

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan


Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
NIP. 19621016 199003 1 003



Tembusan
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa:



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Kampus I Jl. Slt Alauddin Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923
Kampus II Jl. H.M.Yasin Limpo No. 36 Samata - Gowa Tlp. (0411) 424835 Fax 424836

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 816 Tahun 2016
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

- Menimbang** : a. Bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan pada jenjang Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, untuk itu dipandang perlu menetapkan Dosen Pembimbing;
- b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas sebagai Dosen Pembimbing Draft/Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2013 Jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 205 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- 1. Menetapkan** : a. Menunjuk saudara : 1. Dr.H. Abd. Halim Talli, M.Ag.
2. Drs. H. Muh. Jamal Jamil, M.Ag.
- Sebagai pembimbing mahasiswa :
- Nama : Lauhin Mahfudz kamil
- NIM : 10100113036
- Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Peradilan
- Judul Skripsi : EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG RI NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KDRT DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Raha Kelas II)
- b. Melaksanakan pembimbing skripsi sampai mahasiswa tersebut selesai karya tulis ilmiah dengan baik;
- c. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2016;
- d. Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 20 Maret 2017

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan:

Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata-Gowa.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 864928-864930 Fax. 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa - Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

Nomor : 2030.../SI.1/PP.00.9/08.../2017
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : **UNDANGAN MUNAQASYAH**

Samata, 02 Agustus 2017

Kepada

- Yth.*
1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (Ketua)
 2. Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag. (Sekertaris)
 3. Dr. H. Supardin, M.H.I. (Penguji I)
 4. Dra. Hj. Hartini Tahir, M.H.I. (Penguji II)
 5. Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag. (Pembimbing I)
 6. Drs. H. Muh. Jamil Jamil, M.Ag. (Pembimbing II)
 7. Pelaksana

Di
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Munaqasyah atas nama :

Nama : Lauhin Mahfudz Kamil

N I M : 10100113036

Jurusan : Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/i pada Ujian Munaqasyah, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 7 Agustus 2017

Buka Sidang : 08.30 WITA

Waktu : Pukul 11.00 – 12.00 WITA

Tempat : Ruang Ujian Munaqasyah

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam

Dekan,


Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
NIP. 19621016 199003 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal skripsi yang berjudul, "Efektifitas UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Menyelesaikan Perceraian di Pengadilan Agama Raha Sulawesi Tenggara", yang disusun oleh Lauhin Mahfudz Kamil, NIM: 10100113036, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, Jurusan Peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diteliti dan dikoreksi secara saksama serta disetujui untuk diseminarkan (seminar hasil)

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 17 Mei 2017 M
23 Syawal 1438 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Abd. Halim Talli, S.Ag., M.Ag.
Nip. 197110201997031003

Drs. H. Muh. Jamal Jamil, M.Ag.
Nip. 196910042000031002

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan/Prodi



Dr. H. Supardin, M.HI
Nip. 196503021994031003

PERSETUJUAN PEMBIMBING/PENGUJI

Skripsi yang berjudul, "Efektifitas UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Raha Kelas II Sulawesi Tenggara", yang disusun oleh Lauhin Mahfudz Kamil, NIM: 10100113036, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, Jurusan Peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diteliti dan dipertahankan dalam sidang seminar hasil yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017 M, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulkaidah 1438 H, dinyatakan telah diperiksa secara saksama, diteliti dan disetujui untuk dimunaqasyahkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata, 28 Juli 2017 M
4 Dzulkaidah 1438 H

Penguji I : Dr. H. Supardin, M.H.I. 
Penguji II : Dra. Hj. Hartini Tahir, M.H.I. 
Pembimbing I : Dr. H. Abd. Halim Talli, S.Ag., M.Ag. 
Pembimbing II : Drs. H. Muh. Jamal Jamil, M.Ag. 

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan/Prodi



Dr. H. Supardin, M.H.I.

Nip. 196503021994031003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal skripsi yang berjudul, "Efektifitas UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga untuk Menekan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Raha Sulawesi Tenggara", yang disusun oleh Lauhin Mahfudz Kamil, NIM: 10100113036, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, Jurusan Peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diteliti dan dikoreksi secara saksama serta disetujui untuk diseminarkan (seminar proposal)

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 31 Mei 2017 M
6 Ramadan 1438 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Abd. Halim Talli, S.Ag., M.Ag.
Nip. 197110201997031003

Drs. H. Muh. Jamal Jamil, M.Ag.
Nip. 196910042000031002



Diketahui oleh:

Ketua Jurusan/Prodi

Dr. H. Supardin, M.H.
Nip. 196503021994031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I Jl. Sultan Alauddin Makassar Tlp. (0411) 868720 Fax 864923
Kampus II Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata, Gowa Tlp. (0411) 841879 Fax 8221400

Nomor : FSH/PA-HAPK/113/2017
Lamp. : 1 (satu) Proposal
Hal : Undangan Seminar Draft Skripsi

Samata, 2 Juni 2017

Saudara Lauhin Mahfudz Kamil
Kepada Yang Terhormat

1. Dr. H. Abd. Halim Talli, S.Ag., M.Ag. (Pembimbing I)

2. Drs. H. Muh. Jamal Jamil, M.Ag. (Pembimbing II)

Di
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan pelaksanaan seminar proposal, maka kami mengundang untuk menghadiri dan melaksanakan serta bertindak sebagai pembimbing pada seminar draft skripsi tersebut, insya Allah dilaksanakan pada:

Hari/ tanggal : Selasa 6 Juni 2017
Waktu : Jam 09.00
Tempat : Ruang Jurusan Peradilan
Judul Skripsi : EFEKTIFITAS UU RI NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG PENGHAPUSAN KDRT UNTUK
MENEKAN ANGKA PERCERAIAN (DI PENGADILAN
AGAMA RAHA KELAS II SULTRA)

Demikianlah undangan ini kami buat, dan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Wassalam

Ketua Jurusan Peradilan

Dr. H. Supardin., M.HI.

NIP. 196503021994031003

Tembusan Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Alauddin Makassar

PENGESAHAN DRAFT/PROPOSAL SKRIPSI

Draft skripsi yang berjudul, "Efektifitas UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga untuk Menekan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Raha Sulawesi Tenggara" yang disusun oleh Lauhin Mahfudz Kamil, NIM: 10100113036, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam seminar draft/proposal skripsi yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 6 mei 2017 M, bertepatan dengan 10 Ramadan 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan penelitian.

Makassar, 5 Mei 2017 M
10 Ramadan 1438 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Abd. Halim Tali, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197110201997031003

Drs. H. Muh. Jamal Jamil, M.Ag.
NIP. 196910042000031002

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas
Syariah dan Hukum



Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
NIP. 19621016199031003

Diketahui oleh:
Ketua Jurusan Peradilan



Dr. Supardin, M.HI.
NIP. 196503021994031003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.

Lauhin Mahfudz Kamil lahir di Tual Tepatnya di Maluku Tenggara pada tanggal 29 November 1995 dari seorang Ibu yang bernama Rostina Syamsuddin dan ayah bernama Ramly Kamil. Dan menempuh pendidikan dasar di SDN Impres Mangon Fiditan pada Tahun 2001 sampai dengan 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPS Darussalam pada tahun 2007 dan dinyatakan lulus pda tahun 2010. Dan pada tingkat sekolah menengah atas melanjutkan Pendidikan di SMAS Darussalam. Pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2013. Sekarang sedang menempuh perkuliahan di UIN Alauddin Makassar.